

TESIS
MANAJEMEN PEMBERDAYAAN APARAT TERITORIAL DALAM
MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA.

Yang disusun dan diajukan oleh :

TJANDRAWATI
NO. POKOK : P2100211568



Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Makassar, Desember 2013
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP.196509251990022001

Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si
NIP.196007031992031001

Ketua Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196509251990022001

ABSTRAK

TJANDRAWATI. Manajemen Pemberdayaan Aparat Teritorial dalam Mendukung Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (dibimbing oleh **Abdul Rahman Kadir** dan **Syamsu Alam**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1)mengkaji kondisi pelaksanaan manajemen pemberdayaan aparat teritorial, (2) menganalisa faktor faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen aparat teritorial (3) menyusun rumusan strategi optimalisasi manajemen aparat teritorial .

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pedoman wawancara. Populasinya sebanyak 20 orang.

Hasil penelitian menunjukkan (1) kondisi pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial dalam rangka mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS telah berjalan sesuai perencanaan tetapi belum optimal karena keterbatasan piranti lunak (2) faktor faktor penyebabnya karena keterbatasan dalam pengelolaan organisasi, kemampuan personel, sarana dan prasarana juga terbatasnya dukungan masyarakat (3) strategi yang dikembangkan adalah meningkatkan profesionalisme personel, kesadaran bela negara, pelaksanaan pembinaan teritorial secara proporsional.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Keaslian Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI	
DAN METODE PENELITIAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Sistem Pertahanan Negara	12
2.1.2 Tugas Pemberdayaan Aparat Teritorial	18
2.2 Landasan Teori	22
2.2.1 Teori Manajemen	22
2.2.2 Teori Optimilisasi	23
2.2.3 Teori Pemberdayaan	27
2.3 Metode Penelitian	33
2.3.1 Tipe Penelitian	33
2.3.2 Instrumen Penelitian	33
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
2.3.4 Teknik Analisis	35
BAB III KONDISI APARAT TERITORIAL KODIM 1408/BS	
MAKASSAR SAAT INI	37
3.1 Kondisi Geografi	37
3.2 Kondisi Demografi	40

3.3 Kondisi Sosial	41
3.3.1 Pendidikan	41
3.3.2 Kesehatan	42
3.3.3 Ideologi	43
3.3.4 Politik	44
3.3.5 Ekonomi	45
3.3.6 Sosial Budaya	46
3.3.7 Komando Kewilayahan	47
3.3.8 Sumber Kekayaan Alam	52
a. Bahan Pangan	52
b. Bahan Sandang	52
c. Perindustrian	53
d. Perdagangan	53
e. Obyek Vital	54
3.4 Kondisi Pertahanan Negara	54
3.4.1 Aspek Taktis	54
3.4.2 Aspek Bantuan Administrasi	56
BAB IV KONDISI PELAKSANAAN MANAJEMEN APARAT	
TERITORIAL DI WILAYAH KODIM 1408/BS	
MAKASSAR	58
4.1 Aspek Pengorganisasian	58
4.2 Kemampuan Personel	76
4.3 Sarana dan Prasarana	95
BAB V KENDALA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN APARAT	
TERITORIAL DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN	
PERTAHANAN DI WILAYAH KODIM 1408/BS	
MAKASSAR	105
5.1 Kendala Faktor Internal	105
5.2 Kendala Faktor Eksternal	119

BAB VI MANAJEMEN PEMBERDAYAAN APARAT TERITORIAL DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA	123
6.1 Manajemen Pemberdayaan	123
6.2 Indikator Keberhasilan dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aparat Teritorial	126
6.3 Strategi Optimalisasi	128
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	141
7.1 Kesimpulan	141
7.2 Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
PEDOMAN WAWANCARA	147

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan reformasi menuju kehidupan yang lebih demokratis dalam era globalisasi, telah muncul kelompok – kelompok masyarakat untuk berupaya menjadikan beberapa masalah nasional menjadi masalah internasional, kondisi ini menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Demikian pula terhadap organisasi TNI. Kecenderungan terhadap TNI yang muncul akan adanya tuntutan perubahan yang segera. Keputusan politik yang mengatur pelaksanaan operasional peran TNI telah ditetapkan, yakni Tap MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, yang mengatur pemisahan TNI dan Polri serta mengatur peran TNI dalam fungsi pertahanan dan peran Polri dalam fungsi keamanan. Sikap masyarakat selalu mengkritisi dan memojokkan TNI dalam posisi terjepit dan dilematis TNI seolah terpisah dari rakyat, menyikapi perkembangan situasi yang begitu pesat dihadapkan dengan kesiapan wilayah yang selama ini divina oleh komando kewilayahan, sehingga dalam hal ini fungsi pembinaan teritorial menjadi lebih penting mengingat tentangan dan dinamika kehidupan di daerah dapat membuka peluang bagi terciptanya kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu,

penyelenggaraan Binter dalam mewujudkan fungsi Binter sangatlah penting untuk dapat dijadikan landasan yang kuat bagi terciptanya ketahanan wilayah dan juga sekaligus dapat mendukung kepentingan Sishanta.

Masalah teritorial dan penanganannya di Indonesia membutuhkan sesuatu pendekatan yang spesifik melalui suatu prosedur 'geostrategi' yang baik, agar diperoleh: 1) pembinaan wilayah yang dapat menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif di berbagai bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan keberlanjutan pembangunan nasional), 2) faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa, dan 3) pembinaan teritorial yang menitikberatkan pada penyusunan potensi pertahanan dan keamanan (Hankam).

Ditinjau dari perspektif kritis isu aktual tersebut sangat menarik, Pembinaan Teritorial bagi TNI adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan matra darat, laut dan udara; yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemandirian TNI dan rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI.

Apabila dikaitkan dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dasar Hukum yang berkait dengan pembinaan teritorial dalam mendukung ketahanan nasional tersebut, adalah:

- 1) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara: “Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan Utama, dan rakyat sebagai Kekuatan Pendukung”.
- 2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (2): “Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh cadangan dan Komponen Pendukung”.
- 3) UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8d, tentang tugas TNI AD : “Angkatan Darat bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat”.

Demikian pula hal ini secara signifikan berdampak pada struktur organisasi Kodim di daerah yang terpengaruh menjadi fokus pada fungsi pertahanan, yang tadinya juga menangani keamanan dalam arti luas maupun keamanan ketertiban masyarakat. Sinyalemen tentang lemahnya aparat teritorial di

Kodim sampai dengan tingkat Koramil serta berbagai keluhan tentang rendahnya SDM Babinsa sebagai pembina teritorial begitu santer. Bahkan banyak yang mempertanyakan bahwa Koramil sebagai garda terdepan pelaksana fungsi teritorial semakin memprihatinkan karena dianggap kehilangan substansi dan eksistensinya (Nizam, 2012: 8). Diharapkan dengan pendekatan binter yang berhasil dan proporsional dapat mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara di setiap lapisan masyarakat.

Menurut Waaster Panglima TNI pemberdayaan aparat teritorial harus dilakukan secara terus menerus dalam mendukung tugas pokok TNI, dengan kondisi yang telah berubah bukan berarti masalah pemberdayaan aparat teritorial luput dari perhatian kita bersama, justru pada saat kondisi sekarang di saat kemajuan berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi dituntut kreativitas dan inovasi kita dalam melakukan pemberdayaan aparat teritorial yang dilakukan oleh masing-masing Angkatan dengan saling bekerjasama dan saling berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal, TNI tidak boleh tinggal diam dengan perkembangan kondisi tapi justru berperan aktif dalam membangun suasana kondusif di tengah masyarakat (Lukman Sofyan, 2012: 12).

Perubahan peran TNI, hakikat ancaman, dan pemberlakuan otonomi daerah menuntut penyesuaian pula dalam hal peran TNI dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara khususnya oleh TNI AD, termasuk antara lain oleh Kodim sampai dengan Koramil. Koramil sebagai ujung tombak Kodim selaku sub subkompartemen strategis maupun selaku pembina wilayah nasional dalam menjaga integritas NKRI perlu dioptimalkan organisasi dan perannya. Yang terjadi adalah semakin menurunnya peran Koramil sebagai penyangga tugas pokok Kodim, karena yang paling dikhawatirkan adalah tidak munculnya Koramil sebagai ujung tombak Kodim, karena semakin hilang peran dan fungsi Koramil maka eksistensi organisasi AD dipertanyakan. Koramil dianggap sebagai pengejawantahan organisasi TNI AD. Kondisi saat ini dengan segala permasalahannya menentukan formulasi bagaimana upaya konkrit yang harus ditempuh.

Esensi pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta, 2) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara

wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 3) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung (UU RI No. 34/2004 tentang TNI: 10-11).

Pola pikir yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengembangkan variabel kondisi Kodim sebagai kata kunci pertama dan manajemen pertahanan sebagai variabel kedua maka akan melahirkan suatu kondisi tertentu berupa ketahanan nasional sebagai variabel tergantung (dependen). Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan dan keuletan sebagai pencerminan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dari dalam negeri, baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Dephankam RI, 1991: 28).

Keberhasilan pembangunan nasional sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan salah satu prasyarat dalam mendukung terselenggaranya ketahanan nasional. Hal ini dapat dilihat pada konsep pembangunan pertahanan setiap negara dalam mengalokasikan besarnya anggaran untuk mendukung pertahanan. Indonesia masih termasuk negara yang mengalokasikan anggaran pertahanan yang

rendah diantara negara-negara Asia bahkan Asia Tenggara (0,8% PDB). Hal ini diakibatkan prioritas anggaran nasional masih mengejar ketertinggalan dalam hal kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Menyadari bahwa Konsepsi Ketahanan Nasional adalah upaya untuk memanfaatkan dan memadukan segenap potensi meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terbagi dalam 8 (delapan) aspek yang disebut Astagatra (geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan sebagai Tri Gatra dan Idiologi, politik, ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam sebagai Panca Gatra (Soemarno Soedarsono, 1997: 3).

Pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan melakukan berbagai upaya pekerjaan dan tindakan berupa pembinaan teritorial (binter). Operasional pelaksanaan binter saat ini sangat jauh berbeda dengan yang dilaksanakan pada masa lalu. TNI AD dengan komando kewilayahannya di daerah dalam melaksanakan binter tidak lagi menjalankan politik praktis dan juga tidak lagi menjalankan bisnis militer. Komando Teritorial bukan lagi sebagai alat politik dan alat kekuasaan, tetapi kehadirannya semata-mata untuk mewujudkan kemandirian TNI rakyat yang sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa.

Keberadaan komando kewilayah TNI AD adalah gelar kekuatan TNI AD yang disusun berdasarkan strategi pertahanan negara, sedangkan penyelenggaraan fungsi teritorial adalah bagian

dari strategi pembinaan TNI AD. TNI sebagai salah satu komponen bangsa seperti dalam pasal 7 ayat 2 UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. TNI AD memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah darat NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam upayanya memberdayakan wilayah pertahanan peran TNI AD adalah membantu pemerintah di bidang tugas penyiapan potensi nasional menjadi suatu kekuatan pertahanan, menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan memberdayakan rakyat sebagai kekuatan cadangan serta menyiapkan sarana prasarana pendukung sebagai kekuatan pendukung. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang paling mungkin dilaksanakan adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan memberdayakan norma potensi pertahanan di daerah sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan rakyat semesta.

Dengan memperhatikan kepentingan wilayah yang lebih sempit untuk memberdayakan wilayah pertahanan maka penulis mencoba untuk meneliti pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan Kodim 1408/BS dalam menjalankan tugas pokoknya mengamankan wilayah Makassar dan

sekitarnya yang memiliki banyak dinamika sosial dengan kondisi geografi, demografi, kondisi sosial Makassar akan memerlukan suatu analisis dan penelitian secara komprehensif.

Oleh karena itu, bagi kita timbul permasalahan *“Bagaimanakah mengoptimisasikan bidang pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar”*, sehingga dapat membawa wilayah tersebut berkembang ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Peningkatan bidang pertahanan merupakan proses mewujudkan kembali pembangunan bidang pertahanan yang lebih baik daripada pembangunan bidang pertahanan sebelumnya.

Dengan mencermati latar belakang permasalahan dan beberapa bukti upaya bidang pertahanan khususnya peningkatan pemberdayaan aparat teritorial di atas, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan suatu konsep pemikiran yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.2 Perumusan Masalah

Terhadap permasalahan utama di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaksanaan manajemen aparat teritorial belum optimal?
3. Strategi apakah yang dilakukan dalam mengoptimalkan manajemen aparat teritorial?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah menelaah secara ilmiah terhadap manajemen sistem pertahanan rakyat semesta yang di batasi pada manajemen aparat teritorial, dengan ruang lingkup antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji kondisi pelaksanaan manajemen pemberdayaan aparat teritorial.
2. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen aparat teritorial.
3. Menyusun rumusan strategi optimalisasi manajemen aparat teritorial.

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan sumbangan pikiran serta masukan keilmuan untuk dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, selain itu juga kepada para penentu kebijakan yang berkaitan dengan bidang pertahanan khususnya dalam manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan format atau model berupa strategi dalam pemberdayaan aparat teritorial yang merupakan suatu kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga TNI Angkatan Darat. Dengan demikian, ke depan diharapkan akan diperoleh suatu format strategi dalam pemberdayaan aparat teritorial yang mampu mendukung manajemen pertahanan dengan penekanan pada pemberdayaan kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial sampel yang diteliti karena manajemen pertahanan tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai satu kesatuan baik dalam ranah hukum maupun implementasi di lapangan. Menurut pengamatan peneliti, kajian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga sepengetahuan penulis, penelitian ini memenuhi unsur keaslian penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan.

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika melalui pendekatan empiris berdasarkan *field research* (pengamatan lapangan), hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), dan *library research* (pengamatan literatur) yang dibutuhkan dengan pembatasan pada Kodim 1408/BS Makassar yang disusun dengan tata urut sebagai berikut: Bab I : Pengantar, yang disusun dengan pembahasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II : Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, dan Metode Penelitian. Bab III: Kondisi wilayah Kodim

1408/BS Makassar saat ini meliputi kondisi geografi, demografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Bab IV: Kondisi pelaksanaan manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar. Dalam bab ini diuraikan tentang kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen pemberdayaan aparat teritorial di wilayah Kodim 1408/BS Makassar yaitu aspek pengorganisasian, kemampuan personel, sarana dan prasarana yang mendukung serta mekanisme operasional berdasarkan pengumpulan data langsung di lapangan sesuai hasil observasi dan wawancara. Bab V: Kendala pelaksanaan manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar meliputi faktor internal dan eksternal. Bab VI: Manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar. Bab ini menyampaikan rumusan kebijakan, strategi, dan berbagai upaya bidang pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan melalui optimalisasi bidang pertahanan. Bab VII : Penutup. Berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sistem Pertahanan Negara.

Indria Samego dalam bukunya Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis Potensi & Problem, 2001 antara lain memberikan analisis bahwa perubahan kelembagaan politik yang terjadi pasca pemerintahan Orde Baru, yakni dengan TNI meninggalkan aktivitasnya di dunia politik (*political disengagement*) menuju profesionalisme militer. TNI tidak lagi melakukan monopoli dalam menafsirkan stabilitas politik, tetapi harus bersedia melakukan *share* dengan kekuatan sipil. Termasuk di dalamnya memikirkan segala aspek yang berurusan dengan rasa aman masyarakat serta pertahanan negara, bukan lagi mutlak milik tentara. Hal ini menuntut penyesuaian dalam rumusan manajemen pertahanan baik menyangkut format, konsep, maupun aktualisasinya. Semua harus dilakukan secara transparan dengan mengedepankan prinsip egalitarianisme serta suasana hubungan yang lebih baik antara kekuatan sipil dengan unsur militer. Polri dalam era reformasi dan demokratisasi, harus diberi posisi tersendiri yakni sebagai kekuatan penegak hukum dan di bawah kendali sipil (*civilian control*). Demikian pula, ancaman perang

dingin berupa pertikaian antara blok Barat dan Timur beralih menuju pasar bebas dan demokratisasi telah mengubah tuntutan perubahan dalam pendekatan pembangunan nasional yang bersifat “*bottom up*”. Beberapa hal yang sudah mapan pun diminta ditinjau ulang oleh elemen masyarakat. Termasuk *state formation* harus ditentukan kembali dalam Sishankamrata.

Buku Putih Pertahanan Indonesia, Dephan RI, 2008: 43 menyatakan bahwa pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya Sishankamrata yang dinyatakan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 30 dan UU RI No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan seluruh sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh *pemerintah* dan diselenggarakan secara total, terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

UU RI No 34 tentang TNI pasal 7 ayat 1 mengamanatkan bahwa Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Surat Keputusan Kasad No Skep /98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 Bujuk Induk tentang Binter antara lain menyebutkan bahwa dalam sejarah perjuangan Indonesia, merebut dan menegakkan kemerdekaan pada tahun 1945 terlihat dengan jelas bahwa semangat kerakyatan, semangat kesemestaan dan semangat kewilayahan telah menjadi bagian dari semangat juang, semangat nasionalisme dalam mengusir penjajah. Pada saat itu seluruh komponen bangsa sesuai potensi yang dimiliki ikut serta menghadapi penjajah yang disebut dengan Perang Rakyat Semesta. Pada waktu itu, Angkatan Perang Indonesia disusun dalam *pasukan mobile* dan *pasukan teritorial*. Pasukan mobile untuk melaksanakan penghambatan gerakan musuh dan menjadi tenaga penggempur dalam susunan Batalyon, Kompi dan Peleton. Pasukan teritorial mengadakan penjagaan di setiap kabupaten, menyebar menjadi inti gerakan gerilya rakyat di bagian daerah yang lebih kecil seperti Distrik dan Onderan atau Kecamatan. Organisasi kewilayahan ketika itu adalah Komando Militer Daerah (KMD),

Komando Distrik Militer (KDM), Komando Ouder Distrik Militer (KODM) dan kader desa. Gelar inilah yang menjadi cikal bakal Komando Teritorial (Koter) yang saat ini disebut dengan Komando Kewilayahan (Kowil) .

Terwujudnya sistem pertahanan semesta yang merupakan strategi pertahanan negara Indonesia paling tepat, tidak terlepas dari peran Binter yang sekarang ini diselenggarakan oleh komando kewilayahan seperti halnya Kodim. Komando kewilayahan bukan lagi sebagai alat kekuasaan pemerintah, tetapi kehadirannya dengan binter yang benar akan mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat sebagai kekuatan sinergik dalam menyukseskan pembangunan nasional. Pernyataan ini sekaligus untuk membuktikan bahwa opini masyarakat terhadap pembinaan teritorial bukanlah alat politik yang dahulu diberlakukan, tetapi binter yang diinginkan adalah pembinaan terhadap wilayah dan potensi sehingga menjadi suatu kekuatan pertahanan yang mampu menangkal setiap ancaman yang mungkin timbul.

Dalam suatu peperangan, aspek nonfisik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok. Aspek nonfisik di lingkungan daerah operasi berupa ruang, alat dan kondisi juang, diantaranya kemandirian TNI-Rakyat. Oleh karena itulah, sejak awal sebelum adanya UU RI No. 3/2002 tentang pertahanan negara dan UU RI No 34/2004 tentang TNI, pada dasarnya TNI

telah melakukan berbagai upaya membangun lingkungan daerah operasi. Namun demikian, Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh TNI/TNI AD tersebut, sampai dengan saat ini belum memiliki landasan hukum seperti pada Pasal 7 ayat 2b poin 8 Undang-undang RI No 34 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan "Sistem Pertahanan Semesta".

Bahkan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) dalam Seminar Nasional-Interaksi Teritorial, menyatakan bahwa berbagai permasalahan pembinaan teritorial dalam pelaksanaannya di lapangan, seperti belum adanya kesamaan persepsi penyelenggaraan Pembinaan Teritorial; belum terumuskannya kesepakatan tataran kewenangan yang meliputi pembinaan sumber daya nasional di daerah dan pemberdayagunaannya bagi kepentingan pertahanan, serta belum tergambarkannya konsepsi tentang penyelenggaraan pembinaan teritorial selama dan sesudah perang.

Buku Bahan Kuliah Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat untuk Kursus Strategi Perang Semesta oleh Mayjen TNI Hotmangaraja Panjaitan, 20 31 antara lain disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional maka TNI/TNI AD melaksanakan kegiatan Pembinaan Teritorial yang pada hakikatnya adalah kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan

pendukungnya secara dini sesuai dengan pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Binter dalam menunjang pembangunan nasional maupun daerah dapat ditinjau dari dua sisi kepentingan yakni: *pertama*, Binter dalam menunjang ketahanan nasional di daerah berkewajiban untuk membina ketahanan nasional bidang Ipoleksosbudhankam sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan ketahanan nasional sebagai suatu keseluruhan. *Kedua*, Binter berkewajiban untuk membantu terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sikap dan perilaku warga Indonesia untuk wajib bela negara sebagai konsekuensi dianutnya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sesuai UUD 1945.

Edy Prasetyono (2006) dalam bukunya *Kajian Kritis terhadap UU No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Hari T. Prihartono, Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional: 33-56* disebutkan bahwa dalam komunitas pertahanan Indonesia, salah satu perdebatan substansial yang masih terus mengemuka adalah mengenai peran pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini terutama dikarenakan masih tingginya kekhawatiran terhadap

keterlibatan TNI dalam politik praktis melalui jaringan struktur teritorial TNI.

Seminar Nasional Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui Pembinaan Teritorial dalam rangka Pertahanan Negara, Anak Agung Banyu Perwita, 2011: 3-4 menyatakan dalam konteks Indonesia, doktrin pertahanan meliputi berbagai gagasan konseptual yang dikenal sebagai “pertahanan semesta”. Dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/17/X/1991 tanggal 5 Oktober 1991 dan UU Nomor 3/2002, tentang Pertahanan Negara, dapat dilihat bahwa pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan negara adalah tentang penyelenggaraan perdamaian atau operasi militer selain perang (OMSP), dan penyelenggaraan peperangan atau operasi militer perang (OMP). Apabila dilihat pada doktrin tersebut, maka sistem dijelaskan sebagai hal tentang sesuatu yang berkaitan dengan Penyiapan Sistem itu sendiri, Penyiapan Kekuatan, Penyiapan Medan Pertahanan, Penyiapan Dukungan Logistik dan Pelaksanaan Peperangan yang keseluruhannya ditata sebagai pertahanan semesta. Konsep pertahanan semesta itu sendiri merupakan mekanisme tentang masukan, proses dan keluaran dari segala upaya, pekerjaan serta kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara. Masukan (Sumber Daya Nasional), Proses (subyek, obyek dan metode penyelenggaraan pertahanan negara

sesuai UU Nomor 3/2002), dan Keluaran (Daya tangkal negara dan bangsa yang tangguh, dalam bentuk Komponen Utama, Cadangan dan Pendukung). Aturan-aturan tersebut berbentuk peraturan perundangan (payung hukum), struktur 4 organisasi dan mekanisme kerja, serta pedoman-pedoman bersifat mengatur (termasuk doktrin), sehingga terlihat subyek, obyek dan metodenya, untuk dapat mewujudkan tujuan pertahanan negara yang dimaksud oleh UU Nomor 3/2002.

2.1.2 Tugas pemberdayaan aparat teritorial.

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas TNI AD dalam memberdayakan aparat teritorial sesuai dengan UU RI No. 34 tahun 2004 diartikan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan, menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Di sisi lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menciptakan kondisi pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan wilayah otonomi yang meliputi geografi, demografi, dan kondisi sosial. Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan negara, yang ditujukan untuk mendukung terselenggaranya Sishanneg. Dengan demikian, diperlukan pengertian dan kerjasama yang baik

antara TNI AD dan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mengamanatkan bahwa tugas pokok TNI dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah “pemberdayaan wilayah pertahanan, sistem pertahanan keamanan semesta dengan menggunakan seluruh dalam seluruh kekuatan nasional secara total dan integral untuk mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa guna mencapai tujuan nasional.

Pada UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (1) pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan disiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara, ayat (2) sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sesuai dengan UU mendapat tugas membantu pemerintah untuk menyiapkan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara.

Lemahnya manajemen aparat teritorial sehingga pemberdayaan wilayah belum optimal, seperti :

1. Tidak terciptanya kebersamaan aparat teritorial dan masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya,

seperti penerapan wajib lapor kepada masyarakat secara optimal dan kesedaran serta partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah belum optimal.

2. Belum optimalnya saling pengertian dan kebersamaan serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah. Belum terdapat piranti lunak yang sudah divalidasi sesuai dengan perkembangan situasi, begitu pula dengan pendistribusian ke wilayah sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan terciptanya rasa aman dan nyaman.
3. Terbatasnya anggaran dalam menyelenggarakan binter sehingga pelaksanaan binter dalam rangka penyiapan potensi wilayah guna kepentingan sistem pertahanan tidak dapat di laksanakan secara optimal.

Keterkaitan antara pemberdayaan aparat teritorial dengan pembinaan teritorial ternyata memiliki pengertian yang sangat berbeda, sehingga selama ini TNI AD melalui Komando Kewilayahan membantu pemerintah (Kemhan) selaku PTF Kemhan. Namun, sekarang pemberdayaan wilayah pertahanan sudah menjadi tugas pokok TNI dalam OMSP dan menjadi tugas pokok TNI AD di darat, sedangkan Pembinaan Teritorial (Binter)

merupakan salah satu fungsi utama TNI AD dan sebagai metode/cara TNI AD dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang dilaksanakan oleh satuan komando kewilayahan dengan tujuan mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang untuk mendukung TNI AD dalam melaksanakan tugas OMP dan OMSP, sedangkan objeknya sama yaitu geografi, demografi, dan kondisi sosial.

Peraturan Kasad No. Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April tentang Organisasi dan Tugas Kodim, Ketentuan Dasar, Kedudukan. Komando Distrik Militer disingkat Kodim adalah komando pelaksana Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer (Kodam/Korem), bersifat kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer/Komandan Resort Militer (Pangdam/Danrem). Struktur organisasi dibuat sebagai pedoman dan landasan satuan Kodim dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, apa yang tertuang dalam ketentuan organisasi tersebut akan dijalankan dengan baik dan tidak mengalami permasalahan. Organisasi tersebut juga akan memberikan gambaran untuk melakukan pembinaan terhadap wilayah, masyarakat, dan lingkungan.

Studi tentang pemberdayaan komando kewilayahan dalam sistem pertahanan rakyat semesta di wilayah Kodim 0609/Kabupaten Bandung telah dilakukan oleh peneliti lain yakni

Chaidir Serunting Sakti tahun 2009 yang menekankan pentingnya komposisi organisasi, tingkat kemampuan, dan persyaratan pemberdayaan yang diperlukan oleh suatu komando kewilayahan. Jadi, penelitian lebih menekankan pada upaya komando teritorial meningkatkan tugas pokoknya sebagai subkompartemen strategis, sedangkan yang diteliti penulis saat ini adalah menyangkut strategi yang akan dikembangkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan setelah menganalisis permasalahan dan faktor penyebab timbulnya masalah sehingga upaya pemberdayaan wilayah pertahanan belum optimal (khususnya studi di Kodim 1408/BS Makassar).

Organisasi dan tugas Kodim 1408/BS Makassar menyebutkan tugas pokok dan fungsi Kodim 1408/BS Makassar. Petunjuk ini merupakan referensi landasan Kodim 1408/BS Makassar dalam menjalankan misinya sebagai salah satu unsur terdepan TNI AD dalam mengemban tindakan pertahanan wilayah. Tugas pokoknya adalah sebagai bagian integral dari TNI AD, antara lain menegakkan kedaulatan negara keutuhan wilayah darat di daerah wilayahnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Manajemen

Teori Manajemen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

(1) Menurut Horold Koontz dan Cyril O'donnel :

Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

(2) Menurut R. Terry :

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

(3) Menurut James A.F. Stoner :

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan menggunakan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

(4) Menurut Lawrence A. Appley :

Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.

(5) Menurut Drs. Oey Liang Lee :

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Teori Optimalisasi

Teori optimalisasi dalam bidang pemberdayaan aparat teritorial untuk manajemen pertahanan diperlukan sebagai upaya optimal. Gregor (2007:15) menyatakan bahwa optimalisasi diartikan dalam dua perspektif yaitu: 1) upaya untuk mencapai suatu hasil yang setinggi-tingginya dari sebuah kegiatan berdasarkan bukti nyata yang dapat diwujudkan, 2) upaya untuk mencapai tujuan yang seluas-luasnya sesuai dengan manfaat dan kegunaan.

Memahami teori optimalisasi tidak terlepas dari usaha atau upaya yang dilakukan mulai dari tindakan dan kegiatan melaksanakan hasil dan pencapaian tujuan berawal dari memulai dan mengakhiri. Makalassa (2005:11) menyatakan bahwa pencapaian optimalisasi adalah sebuah tindakan dari mengawali dan mengakhiri upaya minimal untuk mencapai maksimal.

Penilaian optimalisasi dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan digunakan teori potensi yang diperkenalkan oleh Girlyd (2006:44) menyatakan bahwa optimalisasi pemberdayaan adalah upaya inisiatif untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada hasil yang maksimal. Upaya inisiatif berupa perbaikan, pemberdayaan dan rehabilitasi dari suatu perubahan yang kurang menjadi perubahan yang memiliki nilai tambah.

Optimalisasi dalam kegiatan pemberdayaan aparat teritorial diartikan dalam tiga prospektif, menurut pandangan Florence

(2004:21) menyatakan bahwa optimalisasi pemberdayaan aparat teritorial adalah sebuah tindakan dan upaya untuk meningkatkan kegiatan penyatuan kesemestaan, kedaulatan dan kemandirian dari seluruh komponen wilayah untuk mencapai sebuah tujuan.

Pandangan optimalisasi erat kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan optimalisasi pemberdayaan wilayah Sishankamrata untuk melakukan tindakan penangkalan, pencegahan, pemeliharaan dan menjauhkan dari segala ancaman, rongrongan, gangguan dan bahaya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri terhadap wilayah Indonesia, maka teori optimalisasi ketahanan sangat diperlukan. Gerald (2007:110) menyatakan ketahanan sebuah wilayah yang utuh, menyatu dan terpadu terwujud melalui tindakan optimalisasi pengwilayahan dan meminimalisasi segala tindakan yang membahayakan.

Optimalisasi pada prinsipnya mencakup empat dasar substansial yang terkandung di dalamnya. Horlate (2005:47) menyatakan optimalisasi dalam prinsip pengwilayahan mencakup: 1) optimalisasi perluasan (*extensive optimilize*) yaitu melakukan optimalisasi seluas-luasnya di dalam melindungi dan mempertahankan sebuah wilayah; 2) optimalisasi kekuasaan (*powering optimilize*) yaitu melakukan upaya mempertahankan optimalisasi kekuasaan dari sebuah kekuatan dan pertahanan; 3)

optimalisasi kebijakan (*policy optimize*) yaitu upaya mempertahankan sebuah aturan dasar dari sebuah kebijakan yang menjadi pedoman untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi sebuah wilayah; dan 4) optimalisasi otonomi (*autonomy optimize*) yaitu upaya untuk menjalankan sebuah otonomi atau kebebasan di dalam menjalankan sebuah roda tata pemerintahan dalam suatu wilayah.

Pandangan berbagai teori tentang optimalisasi memainkan peranan penting dalam sebuah kegiatan pengwilayahan termasuk dalam kegiatan pertahanan untuk menjaga kesemestaan, integritas dan kewilayahan untuk lebih menyatukan bangsa dan negara. Teori hasil yang dikemukakan Neils (2007:13) menyatakan hasil optimalisasi penilaian dalam suatu bangsa dan negara merupakan upaya perekat mencapai tujuan. Tujuan suatu bangsa dan negara pada dasarnya adalah terwujudnya kesejahteraan adil dan makmur.

Optimalisasi pengwilayahan dari sudut pandang ketahanan sebuah wilayah selalu diartikan sebagai upaya yang berarti dan bermanfaat dalam mencapai sebuah tata kenegaraan atau pengelolaan bangsa dan negara secara optimal dalam menjaga wilayahnya untuk tetap berada dalam bingkai kesemestaan, keutuhan yang berintegrasi dalam pengwilayahan yang kondusif, dinamis dan nasional. Steband (2007:14) menyatakan teori bingkai

adalah sebuah teori tentang sudut pandang mengenai pengoptimalisasian dalam melihat sebuah wilayah yang didalamnya terdapat sebuah kedaulatan, keutuhanan, integrasi, perubahan dinamis dengan batas-batas pengwilayahan yang dijamin ketahanannya oleh sebuah bangsa dan negara yang merdeka.

Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka memiliki banyak wilayah yang tersebar dalam suatu kewilayahan yang memiliki kekuatan hukum untuk dijaga, dipelihara, diamankan dan dipertahankan kesemestaannya, integritasnya, kedaulatan dan kemanunggalan rakyat dan wilayahnya untuk secara optimalisasi mengelola potensi wilayahnya untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Unsur penting dari optimalisasi menurut Ginayah (2006:120) bahwa optimalisasi suatu wilayah mengandung lima unsur yaitu: 1) kedaulatan wilayah; 2) kemampuan penduduk mengelola wilayah; 3) ketahanan wilayah; 4) potensi wilayah; dan 5) manfaat pengwilayahan.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, menjadi suatu pertimbangan untuk melihat pentingnya optimalisasi pemberdayaan wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan Sishankamrata yang berada di bawah kewenangan negara dalam hal ini pemerintah di bawah penugasan ketahanan nasional, yang

telah diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam Kementerian Pertahanan Nasional, diperlukan upaya optimalisasi pemberdayaan ketahanan nasional dalam rangka mempertahankan kesemestaan, integritas, keutuhan, kemanunggalan dan kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap berdaulat.

2.2.3 Teori Pemberdayaan

Suatu diskursus pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi. Kieffer dalam Edi Suharto (1998:211) mendeskripsikan secara konkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu; “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah; kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Keadaan dan perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai *deviant* atau menyimpang, kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal, ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor struktural dari adanya kekurangadilan dan faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam Suharto (1998:209); “ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya akses politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan”. Para teoritis seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) yang dirangkum Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Kelompok masyarakat yang kurang berdaya menganggap diri mereka lemah dan tidak berdaya karena masyarakat menganggap demikian”. Seeman menyebutnya dengan alienasi, Seligman menyebutnya dengan ketidakberdayaan dan Learner mengistilahkan dengan ketidakberdayaan surplus.

Berangkat dari fenomena ketidakberdayaan tersebut, maka muncul berbagai tindakan pemberdayaan dengan berbagai

pendekatan mulai dari program yang berkelanjutan sampai pada aktivitas-aktivitas yang sporadis. Pengertian pemberdayaan sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rappaport dalam Suharto (1998:3); “pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”. Torre (1985:18) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah:

“A process through which people become strong enough to participate within, share in the control of, and influence events and institutions affecting their lives, (and that in part) empowerment necessitates that people gain particular skills, knowledge and sufficient power to influence their lives and the live those they care about”.

Jadi tujuan pemberdayaan pada hakikatnya seperti yang dijelaskan Ife (1995:56): *“Empowerment aims to increase the power of disadvantage”.*

Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik, tetapi mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat atas:

1. *Power over personal choices and life chances.*

Kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat

keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal dan pekerjaan dan sebagainya.

2. *Power over the definition of need.* Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
3. *Power over ideas.* Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspersikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. *Power over institutions.* Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat seperti; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.
5. *Power over resources.* Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
6. *Power over economic activity.* Kekuasaan atas aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta pertukaran barang dan jasa.

7. *Power over reproduction*. Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai, dan perilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Menurut Edi Suharto (1985:205) pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling*; adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing.
4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)
2. Pendekatan *mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

2.3 Metode Penelitian.

2.3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian manajemen pemberdayaan aparat teritorial di wilayah Kodim 1408/BS Makassar pada dasarnya termasuk penelitian survei melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis berbagai persoalan secara mendalam dari berbagai sisi kemudian disajikan berdasarkan hasil wawancara yang ditunjang kepustakaan dan pengamatan yang relevan dengan fokus pengamatan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mendukung manajemen pertahanan wilayah Kodim 1408/BS Makassar.

2.3.2 Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan pedoman wawancara (terlampir pada lampiran 3) dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang telah diformulasikan sesuai dengan fokus variabel penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sesuai situasi dan kompleksitas yang berkaitan dengan konsep manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, meliputi 1 orang Dandim, 1 orang Kasdim, 9 orang Danramil, 3 orang pejabat Pemda, 3 orang anggota ormas, dan 3 orang dari LSM di wilayah Makassar yang dipilih secara *purposive*.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan kemampuan observasi dan hasil wawancara yang dikembangkan oleh peneliti. Proses pengumpulan data mengutamakan pandangan data dan informasi sesuai dengan prinsip yang dipedomannya. Teknik yang digunakan mengutamakan pendalaman terhadap fokus pengamatan mengenai pemberdayaan wilayah Sishankamrata di wilayah Kodim 1408/BS Makassar, melalui observasi, wawancara mendalam, pencatatan, rekaman, dan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam pelaporan sesuai reduksi data yang ditemukan untuk diverifikasi (penarikan sebuah kesimpulan hasil penelitian). Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Data yang diperoleh melalui pengembangan pedoman wawancara, peneliti tuangkan dengan melakukan pendalaman wawancara dengan informan inti dan informan kunci untuk menyajikan dan memberikan interpretasi sesuai hasil wawancara, kemudian melakukan verifikasi berupa penentuan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan pemberdayaan aparat teritorial di wilayah Kodim 1408/BS Makassar.

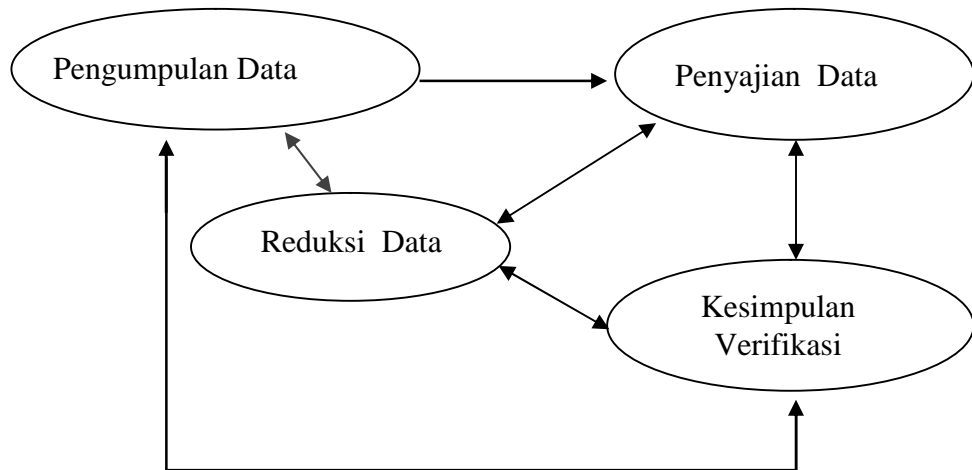
Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yaitu Dandim, Kasdim, Koramil, unsur Pemda, tokoh masyarakat/adat, dan LSM. Wawancara meliputi skup kondisi wilayah, tingkat profesionalisme aparatur Kodim, dan kemungkinan ancaman berupa permasalahan yang dihadapi dengan tingkatan kontijensi

serta sarana prasarana yang dimiliki, sehingga yang menjadi fungsi Kodim sebagai satuan wilayah pertahanan dapat dilakukannya dengan baik. Data dan informasi yang tersedia dapat menjadi bahan analisis bagi penulis untuk membuat suatu konsep manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan Sishankamrata.

2.3.4 Teknik Analisis

Tahapan dalam analisis data ditempuh langkah-langkah: (1) reduksi data, yaitu membuat abstraksi atau rangkuman; (2) penyajian data yaitu dengan mengambil yang pokok-pokok namun dapat dijamin kesahihannya; dan (3) kesimpulan dan verifikasi, menarik kesimpulan tentatif, memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Konsekuensi dari hal tersebut, pengumpulan dan analisis data harus selalu berjalan pada waktu yang bersamaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Secara sederhana, alur analisis data penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Komponen dan Alur Analisis Data
Sumber: Model Interaktif Miles dan Huberman (1992:20)

BAB III
KONDISI APARAT TERITORIAL KODIM 1408/BS MAKASSAR
SAAT INI

3.1 Kondisi Geografi.

Batas daerah Kodim 1408/BS secara umum keadaan geografinya berada di daerah bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas keseluruhan 175.77 km² yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 desa atau kelurahan. Sebagian besar wilayah Makassar merupakan daerah pantai. Wilayah Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan permukaan yang rata dan sebagian wilayahnya terdiri dari beberapa pulau yang tersebar di Selat Makassar, bagian Barat merupakan daerah pantai Selat Makassar, bagian Utara dan Selatan sebagian merupakan daerah pantai dan sebagian rawa-rawa dan tambak yang sebagian besar telah berubah fungsi menjadi tempat pemukiman, pusat perbelanjaan dan sarana rekreasi. Sedangkan daerah bagian Timur dan selatan merupakan daerah persawahan yang sebagian besar juga telah berubah fungsi menjadi tempat pemukiman.

Kota Makassar adalah salah satu Kota di Indonesia yang terkenal karena posisinya terletak di pesisir pantai Selat Makassar, dan merupakan pantai berpasir serta sebagian kecil ditumbuhi terumbu karang. Pantai sebelah Barat mempunyai kedalaman cukup, dimana terdapat Pelabuhan Soekarno-Hatta yang dapat disinggahi Kapal-kapal angkut PelnI dan kapal-kapal berkapasitas besar lainnya termasuk jenis kapal pesiar.

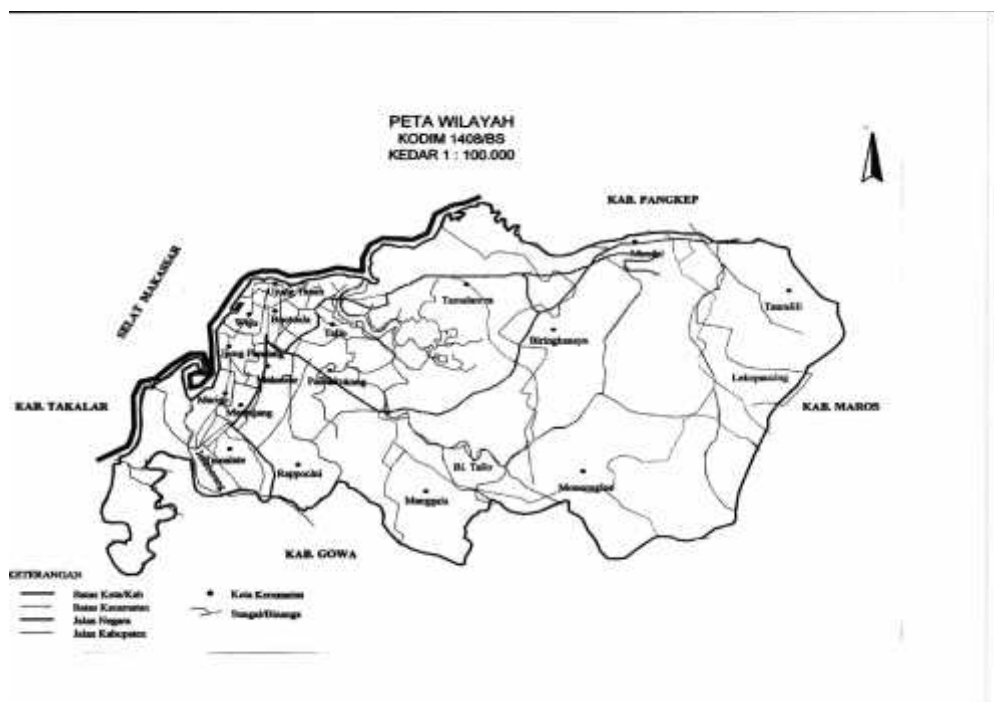
Sedangkan pantai di bagian Utara Kota Makassar terdapat Pelabuhan Paotere yang berfungsi sebagai Pelabuhan Niaga yang dapat disinggahi perahu-perahu kayu/phinisi sebagai alat transportasi laut untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan antara pulau.

Pada bagian pesisir Selatan pantai terdapat rawa-rawa dan tambak yang sejak dahulu banyak ditumbuhi pohon bakau yang berfungsi untuk menahan abrasi pantai. Namun, saat ini sebagian besar wilayah tersebut sudah beralih fungsi menjadi lokasi pengembang dan berubah menjadi tempat pemukiman dan bahkan dijadikan fasilitas umum seperti pembangunan pusat perbelanjaan, sarana rekreasi/hiburan, sehingga kurang baik dijadikan sebagai tempat pendaratan pasukan.

Selain itu masih terdapat tiga aliran sungai yaitu : Sungai Tallo, mengalir melalui wilayah Kec. Panakukang dan bermuara ke pesisir pantai utara Kec. Tallo dengan kedalaman berkisar 3 meter, Sungai Jeneberang, dan Sungai Lekopaccing/Biringkappang, terletak di perbatasan Desa Kurrusumange dengan Desa Toddopuli dan Desa Tompobulu Kec. Mandai Kab. Maros, yang mengalir dan bermuara ke Selat Makassar melalui wilayah Kab. Maros. Sebagian besar dari sungai tersebut dasarnya berlumpur, arusnya sedang dan sewaktu-waktu dapat meluap yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah yang terdapat di sekitar aliran sungai tersebut. Keadaan demikian telah menggambarkan betapa banyak permasalahan yang perlu dihadapi oleh aparaturnya pemerintah di dalam mengembangkan wilayah terkait dengan potensi

wilayah untuk kepentingan pertahanan, sehingga tercipta suatu stabilitas yang dinamis dan mantap di tiap daerah.

Komposisi dari geografi yang ada terdiri dari pulau-pulau, pantai, sungai, pemukiman, pengairan, industri, perkebunan, dan padang rumput. Dari luas wilayah tersebut sebagian besar berupa dataran rendah dan daerah pantai sehingga berpengaruh terhadap kepentingan pertahanan dari aspek medan, medan perlindungan taktis sangat terbatas karena tiadanya dataran tinggi, dan terdapat objek vital berupa bandara internasional Hasanuddin yang sangat potensial bagi pengembangan dinamika ekonomi daerah dan pembangunan daerah Sulawesi Selatan. Justru sungai dan tumbuhan, tanaman yang berada di kawasan tersebut akan berpengaruh terhadap kepentingan wilayah untuk menjadi rintangan/hambatan gerak maju musuh. Oleh karena itu, kondisi geografi dari semua aspek dan bentuknya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pertahanan suatu wilayah, yang tentunya akan menjadi acuan wilayah di dalam menyusun strateginya.



Gambar 3

Peta Wilayah Kodim 1408/BS Makassar

Sumber: Sisrendal Binter 2009-2014 Kodim 1408/BS

3.2 Kondisi Demografi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011, jumlah penduduk wilayah Kodim 1408/BS sebanyak 1.338.663 orang terdiri atas laki-laki 662.009 orang dan perempuan 676.654 orang. Berdasarkan pekerjaan yaitu pegawai negeri/swasta ada 29.230 orang, TNI/POLRI 24.304 orang, pengusaha 97.124 orang, buruh/pekerja sebanyak 219.720 orang, petani 28.794 orang, nelayan 4.010 orang, pedagang 70.645 orang dan lain-lain 48.915 orang. Penduduk berkualifikasi khusus yaitu purnawirawan TNI 4.166 orang, pensiunan

pegawai 5.186 orang, alumni Menwa 119 orang, Wanra 751 orang, Kamra 862 orang, Linmas 1.943 orang dan Satpam 1.879 orang.

Kepadatan penduduk rata-rata per km² yaitu 7.096 orang. Adapun daerah yang padat penduduknya dihadapkan luas wilayah adalah Kecamatan Makassar, Bontoala, Mariso, Mamajang, Wajo, Ujung Pandang dan Tallo, mencapai 371.756 orang (28,46%). Pertambahan penduduk rata-rata setiap tahun adalah 6,2%.

Kekuatan organik Kodim 1408/BS yang baru terisi 90% DSPP 351 orang baru terisi 316 orang (kekuatan sesuai DSPP militer 299 orang dan 52 orang PNS baru terisi 278 orang militer dan 38 orang PNS) tentu belum cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan inti di wilayah tersebut. Dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas personel Dandim dapat memanage kegiatan dan membagi sektor wilayah kepada para Danramil di jajarannya. Akan tetapi, dihadapkan dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya dinamika penduduk, serta meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan tentu menuntut pemberdayaan potensi komponen cadangan dan peningkatan kuantitas maupun kualitas personel Kodim.

3.3 Kondisi Sosial.

3.3.1 Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada saat ini merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya yang ada di wilayah Kodim 1408/BS, sesuai data yang diperoleh

pendidikan merupakan suatu potensi yang dapat digunakan untuk membangun sumber daya manusia di wilayah terkait dengan pemberdayaan komando kewilayahan, maka fungsi pendidikan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas yang dihadapi di dalam memberdayakan wilayah terutama pada sektor pengembangan sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pendidikan dalam wilayah Kota Makassar ditangani oleh Lembaga Pemerintah dan Swasta. Jumlah sekolah dalam wilayah Kota Makassar terdiri dari SD: 472 unit sekolah dengan jumlah murid 124.515 siswa dan jumlah guru sebanyak 4.503 orang, Madrasah Ibtidaiyah (MI): 50 Unit sekolah dengan jumlah murid 7.474 siswa dan jumlah guru sebanyak 6 orang, SMP: 472 unit sekolah dengan jumlah murid 124.515 siswa dan jumlah guru sebanyak 4.076 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 29 unit sekolah dengan jumlah murid 6.650 dan jumlah guru sebanyak 40 orang, Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) : 74 unit sekolah, dengan jumlah murid (-) dan jumlah guru sebanyak 381 orang, Madrasah Aliyah (MA): 25 unit sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.087 siswa dan jumlah guru sebanyak 99 orang, PTN/PTS: 59 Unit (Sumber: BPS Prov. Sulsel 2011: 67-78). Tingginya Animo Pemuda/Pelajar untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (PTN) tidak sebanding dengan jumlah dan fasilitas lembaga pendidikan negeri yang tersedia, oleh karena

itu PTS adalah merupakan alternatif pilihan. Selanjutnya dilihat berdasarkan pendidikan yaitu lulusan perguruan tinggi sebanyak 19.192 orang (4,9%), mahasiswa sebanyak 125.803 orang (32,4%), SMU 56.818 orang (14,6%), SLTP 41.760 orang (10,7%), SD 131.822 orang (33,9%), dan TK 12.664 orang (3,2%).

3.3.2 Kesehatan

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat merupakan hal yang penting bila dihadapkan pada penyiapan sumber daya manusia, karena dengan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan akan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Bagi Kodim 1408/BS fungsi kesehatan menjadi penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang akhirnya bila masyarakat sehat maka akan mendukung sektor keamanan di wilayah dan akan berdampak luas terhadap kondisi wilayah. Seperti ditegaskan dalam buku pembinaan kekuatan TNI bahwa pembinaan kekuatan dalam mendukung pertahanan negara adalah segala upaya kekuatan yang dilaksanakan oleh unsur pembinaan kekuatan dalam lingkungannya yang dapat berbentuk dukungan kesehatan, pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana yang menunjang.

Menerapkan pemberdayaan dari aspek kesehatan akan menciptakan suatu stabilitas yang baik dalam kehidupan masyarakat di lingkungannya. Diketahui bahwa masyarakat masih

banyak yang belum menyadari pentingnya peran kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Kodim 1408/BS perlu menjadi penggerak di dalam memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, ketahanan masyarakat secara berlanjut akan menjadi tolak ukur bagi ketahanan wilayah dari aspek kesehatan.

Penduduk Kota Makassar setiap tahunnya angka penderita penyakit meningkat diantaranya penyakit influenza, TBC, bronchitis, muntaber, demam berdarah dan bahkan akhir-akhir ini telah ditemukan penyakit HIV/AIDS dengan tingkat penyebaran menunjukkan angka yang sangat signifikan.

Fasilitas kesehatan di wilayah Kota Makassar terdiri atas Rumah Sakit Umum= 14 Unit, Rumah Sakit Paru-paru = 1 Unit, Rumah Sakit Kusta = 1 Unit, Rumah Sakit Jiwa = 1 Unit, Rumah Sakit Bersalin = 37 Unit, Puskesmas = 36 Unit, BKIA = 68 Unit dan Poliklinik = 58 Unit. Khusus jumlah tenaga medis dan paramedis adalah sebagai berikut: 1.229 dokter, 387 bidan, 735 mantri kesehatan, dan 2.702 juru rawat (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Sulsel 2011: 84).

3.3.3 Ideologi

Pandangan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara telah sepenuhnya diterima. Namun, penghayatan dan pengamalannya masih sangat terbatas sesuai tingkat kemampuan/pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat,

yang secara umum tidak berpengaruh kepada penyelenggaraan kegiatan maupun operasi.

Ideologi komunis sampai saat ini tidak dapat diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan dasar dan falsafah negara Indonesia, juga sangat bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian, Ideologi Komunis ini perlu diwaspadai karena merupakan bahaya laten.

3.3.4 Politik

Tatanan kehidupan demokrasi semakin berkembang walaupun asas musyawarah untuk mufakat masih perlu diperhatikan sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Namun, masih ada kelompok tertentu yang memiliki perbedaan paham atas pelaksanaan kehidupan demokrasi Pancasila yang diinginkan, terlebih karena derasnya isu globalisasi yang berkaitan dengan tuntutan terhadap HAM, lingkungan hidup dan demokratisasi itu sendiri. Hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan keresahan dan pertentangan sosial – politik dalam berbagai hubungan berbangsa dan bernegara.

Tuntutan reformasi total dan kehidupan demokrasi, juga mempengaruhi peranan tugas dan kewajiban TNI terutama terhadap keberadaan Komando Kewilayahan dalam jajaran TNI AD masih menjadi permasalahan yang mendasar dalam perkembangan kondisi politik ke depan. Saat ini komitmen untuk

tidak mencampuri urusan politik praktis memang telah menjadi garis kebijakan pimpinan TNI AD, namun implementasinya perlu dioptimalkan dan dilaksanakan secara konsisten. Perubahan yang mendasar itu harus dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tuntutan reformasi. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan secara konsisten telah memberikan sumbangan yang besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban regional. Hal ini memberikan dampak yang menguntungkan bagi laju pembangunan nasional.

Aspek politik di era reformasi ini pemahaman dan kesadaran berpolitik masyarakat Kota Makassar cukup tinggi sebagai perwujudan demokrasi, hal ini dapat kita lihat pada proses Pemilu 2009 lalu telah bermunculan berbagai partai politik dan tingginya animo kalangan politisi untuk duduk sebagai anggota Legislatif. Tuntutan demokratisasi oleh mahasiswa terhadap kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat sangatlah keras dengan karakteristik primordial tertentu menyebabkan sulit ditangani secara komprehensif. Akan tetapi, eskalasi menjelang Pemilukada Gubernur dan Wagub Sulsel tahun 2012 menjadi suhu politik naik lagi. Konflik horizontal dan SARA relatif dapat ditekan, yang ada justru ego sektoral kedaerahan dalam konflik antar kampus yang sering terjadi, terbukti tawuran mahasiswa dalam satu kampus sering memakan korban jiwa di antara mahasiswa sendiri.

3.3.5 Ekonomi

Kota Makassar memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan adanya sumber daya manusia dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna telah menyebabkan berbagai komoditi ekonomi semakin berdaya saing di pasaran internasional. Kemajuan hasil pembangunan masih belum merata dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

Taraf hidup masyarakat Kota Makassar pada umumnya cukup baik dan di atas rata-rata, tetapi masih ditemukan warga yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan. Walaupun demikian pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, melalui penyiapan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

3.3.6 Sosial Budaya

Masyarakat Kota Makassar yang mayoritas suku Makassar dan Bugis (84%) memiliki budaya berlayar dan melaut dengan kultur yang bersifat keras dan militan, membawa pengaruh pada kehidupan sosial budaya seperti adanya kebiasaan minum-minuman keras yang dapat berdampak pada terjadinya tindakan melanggar hukum. Secara umum kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya sifat yang

mengedepankan kerjasama dan gotong-royong dalam menjaga dan membangun lingkungannya.

Sikap toleransi sebagai umat beragama yang masih menghargai agama, budaya, adat istiadat dan kebiasaan serta tradisi kelompok atau etnis tertentu sehingga menjamin terciptanya situasi kondusif.

3.3.7 Komando Kewilayahan

Stabilitas keamanan nasional secara umum masih mengandung kerawanan. Hal ini antara lain sebagai akibat dari luasnya wilayah RI, sehingga menyulitkan pengawasan dan pendeteksian atas pelanggaran wilayah kedaulatan dan yuridiksi, karena wilayah udara dan laut yang luas dengan rangkaian pulau-pulau yang memiliki garis pantai yang sangat panjang. Kegiatan subversi sangat bergantung pada perkembangan kondisi keamanan nasional. Adapun hakikat ancaman yang potensial berupa ancaman militer antara lain gerakan separatis bersenjata, pemberontakan, aksi terorisme, pelanggaran wilayah perbatasan, ancaman obyek vital nasional yang bersifat strategis serta ancaman yang dapat mengganggu perdamaian dunia.

Kodim 1408/BS adalah salah satu Komando Kewilayahan dan sebagai pelaksana Kodam VII/Wrb yang bertugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pembinaan teritorial, perlawanan rakyat dan mempersiapkan wilayahnya sebagai salah satu potensi pertahanan yang meliputi Ruang, Alat, dan Kondisi

juang (RAK) yang tangguh, dengan menggelar 12 Koramil (Komando Rayon Militer) yang meliputi :

- a. Koramil 1408-01 berkedudukan di Jl. Galangan Kapal Makassar dengan wilayah binaan Kec. Ujung Tanah.
- b. Koramil 1408-02 berkedudukan di Jl. Butta-butta Caddi Makassar dengan wilayah binaan Kec. Tallo.
- c. Koramil 1408-03 berkedudukan di Jl. Serui Makassar dengan wilayah binaan Kec. Wajo.
- d. Koramil 1408-04 berkedudukan di Jl. Kandea Makassar dengan wilayah binaan Kec. Bontoala.
- e. Koramil 1408-05 berkedudukan di Jl. Dahlia Makassar dengan wilayah binaan Kec. Mariso.
- f. Koramil 1408-06 berkedudukan di Jl. Mawas Makassar dengan wilayah binaan Kec. Mamajang.
- g. Koramil 1408-07 berkedudukan di Jl. Amanagappa Makassar dengan wilayah binaan Kec. Ujung Pandang.
- h. Koramil 1408-08 berkedudukan di Jl. Kerung-kerung Lr. 12 Makassar dengan wilayah binaan Kec. Makassar.
- i. Koramil 1408-09 berkedudukan di Jl. Malengkeri Makassar dengan wilayah binaan Kec. Tamalate dan Kec. Rappocini.
- j. Koramil 1408-10 berkedudukan di Jl. Abdullah Dg Sirua Makassar dengan wilayah binaan di Kec. Panakukang dan Kec. Manggala.

- k. Koramil 1408-11 berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM-14 Makassar dengan wilayah binaan di Kec. Biringkanaya dan Kec. Tamalanrea.
- l. Koramil 1408-12 berkedudukan di Jl. Poros Maros KM-23 Makassar dengan wilayah binaan di Kec. Mandai, Kec. Tanralili dan Kec. Moncongloe.

Adapun klasifikasi daerah yang rawan di Kota Makassar terdiri atas rawan politik, rawan sara, rawan kriminalitas dan rawan bencana. Lebih jelasnya diuraikan di bawah ini:

a. Rawan politik terdiri atas:

- 1) Kecamatan Ujung Tanah bagian Utara (Kel. Cambaya, Kel. Ujung Tanah dan Kel. Patingaloang).
- 2) Kecamatan Tallo bagian Timur (Kel. Rappokalling, Kel. Kalukubodoa dan Kel. Rappojawa).
- 3) Kecamatan Wajo (Kel. Malimongan Tua).
- 4) Kecamatan Bontoala (Kel. Layang).
- 5) Kecamatan Tamalate (khusus kampus UNM dan IAIN).
- 6) Kecamatan Biringkanaya (khusus kampus Unhas Tamalanrea).

b. Rawan SARA.

- 1) Kecamatan Ujung Tanah (Kel. Patingalloang, Kel. Cambaya dan Kel. Ujung Tanah).
- 2) Kecamatan Wajo (Kel. Pattunuang, Kel. Melayu dan Pelabuhan Soekarno Hatta).

- 3) Kecamatan Ujung Pandang (Jl. Somba Opu).
- 4) Kecamatan Tamalate (Kel. Maccini Sombala, dan Kel. Mangasa).
- 5) Kecamatan Biringkanaya (Kompleks Perumahan BTP).

c. Rawan kriminilitas

- 1) Kecamatan Ujung Tanah (Jl. Cakalang, Jl. Barukang, Kel. Patingalloang, dan Kel. Gusung).
- 2) Kecamatan Tallo (Kel. Tammua dan Kel. Cambaya).
- 3) Kecamatan Wajo (Jl. Tarakan, Jl. Nusantara, Jl. Sulawesi dan Jl. Nusa Kambangan).
- 4) Kecamatan Bontoala (Jl. Kandeana dan Jl. Masjid Raya).
- 5) Kecamatan Mariso (Jl. Landak Baru, Jl. Rajawali dan Jl. Anggrek).
- 6) Kecamatan Mamajang (Jl. Kakatua, dan sekitar Stadion Mattoangin)
- 7) Kecamatan Ujung Pandang (Jl. Sungai Limboto, Jl. Sungai Pareman dan Jl. Gunung Nona).
- 8) Kecamatan Makassar (Kel. Bara-Baraya, Kel. Maccini dan Kel. Karuwisi).
- 9) Kecamatan Rappocini (Kel. Rappocini dan kampus UNM Gunung Sari).
- 10) Kecamatan Tamalate (Kampus IAIN dan UNM Parang Tambung).

- 11)Kecamatan Manggala (Kel. Antang).
- 12)Kecamatan Panakukang (Kel. Pampang/kampus UMI/kampus Univ. 45, Jl. Sukaria dan Kel. Sinrijala).
- 13)Kecamatan Tamalanrea (Kampus Unhas, Komp. BTP)
- 14)Kecamatan Biringkanaya (Kel. Sudiang, KIMA).
- 15)Kecamatan Mandai (Kel. Tanralili).

d. Rawan bencana

Kota Makassar yang beriklim tropis dengan mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Keadaan ini menjadikan Kota Makassar sangat rentan dengan bencana alam yang meliputi banjir, angin puting beliung dan kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. Oleh karena itu, daerah rawan bencana dalam wilayah Kota Makassar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Rawan banjir, pada musim penghujan sering terjadi bencana banjir di beberapa tempat dalam wilayah Kota Makassar diantaranya wilayah Kec. Tamalate, Kec. Panakukang, Kec. Manggala, Kec. Biringkanaya, Kec. Wajo, Kec. Tallo dan Kec. Ujung Tanah.
- 2) Rawan angin puting beliung, pada musim penghujan selain terjadi bencana banjir juga seringkali terjadi bencana angin puting beliung di beberapa daerah dalam wilayah Kota

Makassar, diantaranya Kec. Biringkanaya, Kec. Tamalanrea, Kec. Ujung Tanah, Kec. Tallo, Kec. Mariso dan Tamalate.

- 3) Rawan kebakaran, dalam wilayah Kota Makassar hampir setiap saat terjadi bencana kebakaran khususnya pada musim kemarau pada bulan Mei s.d. November setiap tahunnya, penyebabnya adalah selain dari faktor kelalaian manusia juga seringkali terjadinya kebakaran karena hubungan arus pendek listrik (korsluiting).

3.3.8 Sumber Kekayaan Alam

a. Bahan Pangan

1. Makanan pokok penduduk adalah beras, sedang jagung dan ubi-ubian sebagai makanan tambahan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk Kota Makassar masih memasukkan beras dari luar daerah pada umumnya dari Kab. Sidrap dan Pinrang serta pada daerah penghasil beras lainnya.
3. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan di wilayah Makassar cukup rendah dengan produksi rata-rata 5.076,64 ton per ha (produksi padi 15.697,57 ton dengan luas area 3.092 ha), distribusi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri, dan kebutuhan untuk konsumsi sendiri berarti bukan termasuk wilayah yang surplus produksi pangannya.

b. Bahan Sandang

1. Bahan sandang untuk kebutuhan penduduk pada umumnya masih didatangkan dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa.
2. Industri sandang setempat yang ada pada umumnya masih bersifat sederhana dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk, seperti produksi yang dihasilkan oleh pabrik Makatex di Jl. Malengkeri Raya.

c. Perindustrian

1. Perindustrian di Kota Makassar pada umumnya terpusat di lokasi Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang sudah berstandar nasional maupun internasional dan telah dipasarkan di manca negara (159 perusahaan industri) bergerak di bidang bahan bangunan dan makanan yang memproduksi makanan ternak, indomie, seng, pengolahan besi, semen, dan lain-lain produksi.
2. Selain itu masih terdapat Home Industri yang dikelola oleh penduduk yang tersebar di beberapa wilayah kelurahan seperti Industri Meubel, peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya.

d. Perdagangan

1. Kota Makassar terdapat dua buah Pelabuhan Laut, yaitu Pelabuhan Soekarno Hatta yang selain sebagai tempat berlabuh Kapal-kapal Pelni juga mengelola pengangkutan Peti Kemas dan Pelabuhan Rakyat (Pelra) Paotere.
2. Barang-barang ekspor dari pelabuhan ini antara lain berupa hasil laut yaitu udang, ikan, teripang, rumput laut dan hasil pertanian berupa beras, jagung, kayu, kopra, kakao, dan sebagainya.
3. Kota Makassar merupakan pusat perdagangan di Sulsel utamanya barang-barang produk pertanian yang berasal dari berbagai daerah, kota/kabupaten se-Sulsel/Sulbar.

e. Obyek Vital

Obyek Vital yang terdapat dalam wilayah Kota Makassar:

1. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
2. Pelabuhan Laut Soekarno Hatta di Jl. Nusantara Baru Makassar.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello di Jl. Urip Sumoharjo KM-6 Makassar.
4. Instalasi PDAM Kota Makassar di Jl. DR. Ratulangi Makassar.

5. Instalasi Pertamina Unit Pengisian di Jl. Sabutung Baru Makassar.
6. Stasiun TVRI Makassar di Jl. Kakaktua Makassar.
7. Stasiun RRI Makassar di Jl. Riburane Makassar.
8. PT. Telkom Makassar di Jl. A.P. Pettarani Makassar.
9. PT. PLN Persero Sultanbatara di Jl. Hertasing Makassar.

3.4 Kondisi Pertahanan Keamanan

3.4.1 Aspek Taktis

a. Medan kritik

1. Medan-medan kritik di wilayah Kota Makassar terdapat pada sepanjang pesisir pantai dan beberapa pulau yang tersebar di wilayah Selat Makassar yang sangat memungkinkan dapat digunakan sebagai tempat pendaratan pantai.
2. Banyaknya bangunan bertingkat yang tersebar di wilayah Kota Makassar termasuk keberadaan Benteng Rotterdam dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan karena posisinya berada di dekat pantai Selat Makassar.
3. Beberapa wilayah di Selatan dan Timur Kec. Mandai terdapat ketinggian berupa tanah pegunungan yang

ditumbuhi semak-semak dan hutan kayu serta bambu dapat dijadikan sebagai tempat untuk pertahanan.

- b. Lindung Tinjau dan Lindung Tembak. Kondisi perkotaan yang terdiri dari banyaknya bangunan yang tinggi adanya serta pemukiman baru yang tersebar di pinggiran Kota dapat menguntungkan pihak kita karena sangat baik untuk dijadikan sebagai lindung tinjau dan tembak.
- c. Lapangan Tinjau dan Lapangan Tembak. Wilayah Kota Makassar terdiri dari daerah yang rata dan kurang tumbuh-tumbuhan, kondisi tersebut dapat memberikan ruang untuk dijadikan sebagai lapangan tinjau dan lapangan tembak yang baik.
- d. Rintangan-rintangan. Dalam wilayah Kota Makassar terdapat bangunan tinggi, sungai dan parit-parit yang cukup lebar dan sebagian pesisir pantai utara dan selatan ditumbuhi bakau dan nipah serta rawa dapat merupakan rintangan bagi pergerakan atau manuver pihak musuh.
- e. Jalan-jalan pendekat. Kondisi wilayah Kota Makassar yang merupakan daratan yang rata dan terdapat jalan-jalan poros dan jalan-jalan pendekat yang dapat menghubungkan daerah yang satu dengan daerah lainnya, dapat memberikan keuntungan baik terhadap

pihak kita maupun pihak musuh untuk dapat dengan mudah berpindah tempat.

3.4.2 Aspek bantuan administrasi.

- a. Personel. Secara umum pengerahan personel penduduk Makassar (1.253.656 orang), komponen dasar Ratih (Hansip, Linmas, Wanra, Kamra, Menwa, dan Satpam/Polsus (7.744 orang), kekuatan TNI dan Cadangan TNI (18.325 orang) dengan kualitas sesuai dengan profesi masing-masing dipandang cukup mampu mendukung kegiatan maupun operasi sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana karena didukung oleh beberapa aspek diantaranya kondisi wilayah yang sangat memungkinkan dan tersedianya sarana maupun prasarana pendukung.
- b. Logistik. Pendistribusian logistik berupa natura (beras dan bahan kebutuhan pokok), minyak, air, BBM, dapat terdukung dari Depo Pertamina dan objek vital lain dengan prasyarat aman dalam perlindungan pasukan sendiri, sehingga dukungan kepada pasukan untuk melancarkan kegiatan dan operasi secara umum dapat dilaksanakan karena kondisi wilayah khususnya sarana jalan dan transportasi cukup tersedia dan memadai.

BAB IV

KONDISI PELAKSANAAN MANAJEMEN APARAT TERITORIAL DI WILAYAH KODIM 1408/BS MAKASSAR

4.1 Aspek Pengorganisasian

Aspek pengorganisasian yang berkaitan dengan kondisi pelaksanaan manajemen aparat teritorial dalam rangka Sishankamrata di wilayah Kodim 1408/BS Makassar, tidak terlepas dari adanya organisasi dalam satuan komando kewilayahan dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta sesuai dengan pembinaan teritorial.

Aspek pengorganisasian menjadi penting dalam menata dan mengatur pelaksanaan sebuah kegiatan pemberdayaan wilayah yang terencana, terarah, terkoordinasi, terawasi dan terkendalikan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tentara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan prasyarat bahwa kondisi pelaksanaan manajemen aparat teritorial perlu dipandang dan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya.

Pokok-pokok penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial saat ini yang dilakukan oleh Kodim 1408/BS Makassar meliputi pengelolaan potensi nasional, penyelenggaraan fungsi pembinaan

teritorial, pelaksanaan pembinaan teritorial, mengembangkan visi, misi dan asas dari sebuah pengorganisasian yang nyata dan konkrit.

Secara umum aspek pengorganisasian dari kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam Sishankamrata telah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 tentang "Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.

Menurut pandangan aspek organisasi memberikan makna yang tersirat dari sistem pertahanan yang bersifat semesta mengandung nilai-nilai bahwa aspek pengorganisasian bersifat "kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan" dengan mengarahkan seluruh potensi nasional secara total dan integrasi dengan pengertian sebagai berikut:

1. Bersifat kerakyatan artinya bahwa dalam suatu kegiatan pengorganisasian pemberdayaan aparat teritorial diperlukan adanya keikutsertaan seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam sistem pertahanan negara.
2. Bersifat kesemestaan artinya dalam suatu kegiatan pengorganisasian pemberdayaan aparat teritorial diperlukan adanya andil seluruh bangsa dan negara mampu memobilisasi diri

guna menanggulangi segala bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri.

3. Bersifat kewilayahan, artinya dalam suatu kegiatan pengorganisasian pemberdayaan aparat teritorial diperlukan adanya wilayah negara sebagai tumpuan perlawanan agar didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

Ketiga hal ini menjadi filosofi dari pengorganisasian di dalam memaknai sistem pertahanan semesta yang merupakan satu sifat kesatuan yang bulat dan utuh serta sebagai totaliter dalam menata konsepsi pertahanan negara dalam mewujudkan “kemanunggalan TNI dan rakyat yang tidak terlepas dari sifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan.

Memahami pentingnya aspek pengorganisasian dalam pemberdayaan aparat teritorial di wilayah Kodim 1408/BS Makassar, maka tindak lanjut dari kondisi riil yang dapat dilihat dari satu pengorganisasian yaitu adanya:

1. Pengelolaan Potensi Nasional

Secara umum yang dimaksud dengan pengelolaan potensi nasional sebagai bagian dari aspek pengorganisasian dalam pemberdayaan aparat teritorial di wilayah Kodim 1408/BS Makassar, yaitu upaya yang dilakukan oleh TNI dalam melakukan pengelolaan potensi nasional meliputi aspek geografi, demografi,

sumber kekayaan alam dan kondisi sosial yang mendukung terpeliharanya pemberdayaan aparat teritorial. Pelaksanaan pengelolaan potensi nasional yang dilaksanakan secara terorganisir mempunyai kaitan yang erat dengan kegiatan pembinaan teritorial yang merupakan jembatan dari pelaksanaan tugas pemberdayaan aparat teritorial yang dilaksanakan oleh aparat TNI, pemerintah dan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengorganisir pengelolaan potensi pengwilayahan.

Sistem pertahanan yang bersifat semesta selalu mengorganisir potensi nasional sebagai potensi pertahanan yang diarahkan untuk menumbuhkan perlawanan rakyat terhadap berbagai hakikat ancaman yang datang mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI, potensi wilayah ini perlu diorganisir secara utuh, terpadu, terarah dan berorientasi pada tujuan dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat melalui pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan aparat teritorial.

2. Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Teritorial

Salah satu upaya dalam melakukan pengorganisasian dalam rangka pemberdayaan aparat teritorial, yaitu dengan menyelenggarakan fungsi pembinaan teritorial. Hal ini penting untuk memberikan penguatan tentang pentingnya kelembagaan TNI bersama pemerintah dan masyarakat untuk memahami aspek-aspek pemberdayaan dominan teritorial yang di dalamnya

mencakup enam hal yang perlu disikapi sebagai sebuah fungsi pembinaan teritorial dalam tugas pemberdayaan wilayah:

- a. Sebagai langkah operasional dan penyelenggaraan tugas pemberdayaan wilayah.
- b. Penyusunan kekuatan kewilayahan berupa RAK Juang bagi kepentingan pertahanan negara adalah sebagai upaya untuk menjamin kesiapan dan kelancaran sistem pertahanan yang mewujudkan potensi menjadi kekuatan kewilayahan yang siap dikerahkan guna mendukung pelaksanaan operasi pertahanan.
- c. Pengerahan dan menyusun kekuatan kewilayahan sebagai totalitas kekuatan wilayah yang ada, dapat diwujudkan melalui pembinaan semua aspek kewilayahan, sehingga hasil pembinaan secara terpadu dapat diarahkan untuk menciptakan kepentingan pertahanan negara.
- d. Melalui pemberdayaan wilayah, Kodim 1408/BS Makassar memiliki fungsi pembinaan kekuatan pertahanan, dapat mewujudkan tugasnya dengan menjadi perekat bagi setiap komponen bangsa agar dapat menunjang serta mengakselerasi dan menyukseskan tugas TNI dalam sistem pertahanan.
- e. Fungsi pemberdayaan aparat teritorial, sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan tugas pokok, secara optimal dapat diwujudkan melalui menyiapkan kondisi setiap jajaran baik secara perorangan maupun satuan, melalui pembentukan sikap

teritorial untuk menjamin kemanunggalan Kodim 1408/BS Makassar.

- f. Kedudukan pembinaan teritorial pada fungsi pertahanan merupakan pelaksanaan tugas dari penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dapat dijadikan perekat untuk menunjang pengakselerasian dan menyukseskan pelaksanaan peran yang berada dalam kaitan sistem pembinaan, ketahanan nasional dan pertahanan negara serta fungsi untuk mendukung suksesnya tugas pokok Kodim 1408/BS Makassar.

Keenam fungsi pembinaan teritorial ini menjadi penting dalam mendukung kegiatan pengorganisasian dalam pemberdayaan wilayah guna menunjang terselenggaranya peran pembinaan teritorial dalam prospektif kegiatan sebagai salah satu kegiatan utama dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan mewujudkan kemanunggalan Kodim 1408/BS Makassar – rakyat dalam mendukung tugas pokok pada sistem pertahanan negara juga menjadi penguat hakikat pembinaan teritorial yaitu melakukan kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan Kodim 1408/BS melalui kegiatan bantuan dan mengatasi kesulitan masyarakat.

3. Pelaksanaan Pembinaan Teritorial

Pelaksanaan pembinaan teritorial memainkan peranan penting dalam pengorganisasian sebagai upaya untuk melaksanakan pembinaan teritorial dalam memberikan penguatan pemberdayaan wilayah sesuai dengan:

- a. Tujuan pelaksanaan pembinaan teritorial dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. tugas yang diberikan kepada Kodim 1408/BS Makassar dalam rangka pembinaan potensi nasional melaksanakan peran dan fungsinya agar terbentuk suatu kondisi yang menguntungkan bagi kepentingan pembinaan dan penggunaan kekuatan pertahanan bagi Kodim 1408/BS Makassar dengan tujuan:
 - 1) Untuk mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara di daratan dan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
 - 2) Untuk mewaspadaikan ancaman yang harus ditanggulangi secara nasional oleh segenap komponen bangsa.
 - 3) Untuk membina wilayah beserta segenap isinya terutama perlawanan rakyat guna terpeliharanya klasifikasi daerah yang secara cermat sesuai dengan kondisi daerah.
 - 4) Untuk mendukung penyelenggaraan operasi pertahanan dalam rangka menyiapkan kekuatan kewilayahan sesuai dengan kompartementasi daerah.

- 5) Untuk mendukung dan menyiapkan ruang operasi perlawanan wilayah maupun operasi ofensif balas satu sistem bela negara dan logistik wilayah untuk mempertahankan negara.
 - 6) Untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa guna memelihara dan meningkatkan kewibawaan pemerintah dan terciptanya kemandirian Kodim 1408/BS Makassar.
- b. Pembinaan teritorial dilaksanakan baik sebelum, selama, dan sesudah perang untuk mewujudkan RAK Juang yang tangguh yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai ketatalaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembinaan teritorial merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui pembinaan yang terencana, bertahap dan berkesinambungan oleh seluruh unsur yang terkait, sehingga tujuan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dicapai secara lebih berhasil dan berdayaguna.
 - d. Sasaran pembinaan teritorial dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. Untuk mewujudkan suatu kondisi yang dihadapi dalam suatu wilayah yang berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan negara, berupa kepentingan terpeliharanya wilayah nasional dan tata ruangnya serta

terkelolanya sumber daya alam dan buatan dan sumber daya manusia dalam suatu sistem bela negara serta terwujudnya wilayah juang yang tangguh untuk menunjang kepentingan sistem pertahanan semesta.

4. Mengembangkan Visi, Misi, dan Asas Pengorganisasian

Pengorganisasian diperlukan dalam pengembangan kondisi pemberdayaan wilayah Sishankamrata yang harus sesuai dengan visi, misi, dan asas pengorganisasian yang diterapkan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar sebagai berikut:

a. Visi

- 1) Terwujudnya kemampuan Komando Wilayah pertahanan guna mewujudkan RAK Juang yang tangguh.
- 2) Terwujudnya kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk dapat digunakan sebagai kekuatan pengganda yang terorganisir dalam mengatasi hakikat ancaman secara maksimal.

b. Misi

- 1) Mantapnya Komando Wilayah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodim 1408/BS melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.
- 2) Mantapnya postur Komando Wilayah untuk mendukung kesiapan tugas unsur-unsur Kodim 1408/BS Makassar

dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di wilayah NKRI serta kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk mendukung komponen utama.

c. Asas Pengorganisasian

Pembinaan teritorial dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Semesta. Persiapan pertahanan harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan Komando. Pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial harus berada pada satu komando, sehingga memberikan hasil untuk mencapai sasaran.
- 3) Manfaat. Penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial harus memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan Kodim 1408/BS Makassar.
- 4) Terus-menerus. Penyelenggaraa pemberdayaan aparat teritorial harus dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga kesinambungan penyiapan pertahanan negara dan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kodim 1408/BS Makassar.
- 5) Prioritas. Penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial harus dilihat dari keterbatasan dana, sarana dan prasarana

yang ada pada negara dan Kodim 1408/BS, sehingga harus ditentukan prioritasnya.

- 6) Keterpaduan. Penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan semua komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung serta mengikutsertakan organisasi yang mewadahi kebutuhan pengganda kekuatan komponen utama.
- 7) Tanggap. Penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial harus memiliki ketanggapsegeraan terhadap perkembangan yang terjadi di wilayah untuk kepentingan pertahanan yang dilaksanakan dan kepentingan pertahanan negara secara menyeluruh.
- 8) Kewenangan dan tanggungjawab. Penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial harus memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- 9) Keterbukaan. Penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial harus didasarkan kepada data obyektif dengan tidak merekayasa keadaan, sehingga mencapai sasarnya.

Uraian di atas didukung oleh teori akses, teori wilayah, teori teritorial, teori implementasi, teori fungsi dan manfaat. Teori akses yang dikembangkan oleh Grace (2008:19) menyatakan bahwa

pemberdayaan suatu wilayah dalam sebuah negara pada dasarnya adalah mempertahankan akses potensi yang dimiliki oleh suatu negara berupa potensi geografi, demografi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan dalam mendukung kemajuan suatu bangsa.

Teori ini relevan dengan teori wilayah yang dikemukakan oleh Friedlin (2004:25) menyatakan bahwa wilayah adalah batas-batas hukum suatu negara meliputi daratan, lautan dan udara yang dapat dikelola untuk kemakmuran suatu negara sehingga perlu dipertahankan keamanannya melalui sistem pertahanan. Ini bertautan dengan teori teritorial yang dikemukakan oleh Gronov (2008:23) yang menyatakan teritorial merupakan potensi pemberdayaan pertahanan suatu negara dari intervensi suatu negara, karenanya perlu dipertahankan.

Memahami pentingnya teori wilayah dan teritorial dalam suatu negara, maka teori implementasi yang dikemukakan oleh Arfah (2006:113) menyatakan bahwa menjaga kesemestaan, keutuhan, integrasi dan kewilayahan merupakan implementasi utama dari ketahanan bangsa dan Negara. Implementasi diartikan upaya untuk menjaga pertahanan dan ketahanan bangsa dan negara dari berbagai ancaman luar dan dalam negeri. Teori implementasi ini diarahkan untuk mengembangkan teori fungsi dan manfaat yang dikemukakan oleh Frankurt (2007:88) bahwa pemberdayaan suatu pengwilayahan

selalu dilihat dari fungsi dan manfaat untuk menunjukkan kekuatan, keluasan, martabat dan kehormatan bangsa dan Negara dalam mempertahankan dan menjaga ketahanan negaranya.

Berdasarkan hasil observasi mengenai kondisi pemberdayaan wilayah dalam Sishankamrata di wilayah Kodim 1408/BS Makassar dilihat dari aspek pengorganisasian dari tinjauan pengelolaan potensi wilayah, fungsi teritorial, pelaksanaan teritorial, visi, misi dan asas yang diemban menjadi perlu dan penting dalam rangka mewujudkan pemberdayaan yang utuh, terpadu, integrasi yang melibatkan adanya kemandirian Kodim 1408/BS Makassar dan rakyat untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sebuah wilayah.

Menyikapi hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Dandim, Kasdim, dan dengan Danramil, beserta tokoh masyarakat, aparat Pemda, LSM untuk menanyakan secara mendalam tentang pentingnya aspek pengorganisasian dalam rangka meningkatkan kondisi manajemen aparat teritorial wilayah di Kodim 1408/BS Makassar. Berikut petikan wawancara dengan Dandim 1408/BS yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2013 dengan inisial Mar menyatakan:

“Secara umum aspek pengorganisasian memainkan peran penting dalam pengelolaan potensi nasional dalam rangka mengamankan, menyelamatkan, melindungi dan memberdayakan potensi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan kondisi sosial dalam melakukan kegiatan pembinaan teritorial sesuai dengan aktivitas pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi tugas dan fungsi Kodim 1408/BS yang sesuai dengan visi, misi, dan asas yang diemban”.

Memperhatikan kondisi di atas maka dapat diketahui, bahwa dalam aspek organisasi di Kodim telah mampu menyelenggarakan tugas pokoknya yang disesuaikan dengan visi, misi dan asas yang diembannya. Walaupun sampai saat ini masih adanya kegiatan yang memiliki keterbatasan anggaran seperti kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti bela negara dan pembinaan teritorial di wilayah, sehingga hasil yang dicapai belum optimal.

Selanjutnya pendalaman juga dilakukan kepada Kasdim yang diwawancarai pada tanggal yang sama 6 Juli 2013 dengan inisial Ign yang memberikan tanggapan atas pengembangan pertanyaan menyangkut aspek pengorganisasian dikaitkan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mendukung manajemen pertahanan yaitu sebagai berikut :

“Pengorganisasian yang berkaitan dengan kondisi pemberdayaan wilayah tidak terlepas dari pokok-pokok penyelenggaraan wilayah pertahanan yang sesuai pembinaan teritorial yaitu selalu siap dalam menyelenggarakan langkah-langkah operasional, menyusun kekuatan wilayah, melakukan pengerahan dan penyusunan kekuatan pengwilayahan melalui pemberdayaan pertahanan dan memperbaiki kedudukan pembinaan teritorial dengan senantiasa melibatkan pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan aktivitas semesta, kesatuan komando, perbaikan manfaat, kebersinambungan, prioritas, keterpaduan dan tanggap atas berbagai kewenangan dan tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa dan negara”.

Secara umum pandangan di atas menunjukkan bahwa semua upaya aspek pengorganisasian telah dilaksanakan berdasarkan

langkah operasional pembinaan territorial, dan berupaya melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam menjalankan peran masing-masing khususnya dalam upaya bela Negara. Walaupun disadari sepenuhnya kondisi lapangan sering banyak muncul permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok tersebut.

Selanjutnya untuk melihat tingkat penerapan secara operasional kegiatan pengorganisasian dalam kaitannya dengan kondisi pemberdayaan aparat teritorial, dilakukan wawancara dengan Danramil-01/Ujung Tanah pada tanggal 13 Juli 2013 dengan inisial Bur dengan hasil sebagai berikut:

“Wujud pengoperasian pengorganisasian pemberdayaan wilayah pembinaan territorial yang diterapkan selama ini mengacu pada pedoman pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang tujuannya untuk melakukan pembinaan potensi nasional melaksanakan peran dan fungsi mengembang potensi rasional menjadi kekuatan pertahanan bagi suatu negara, senantiasa sigap mewaspadaikan ancaman yang harus ditanggulangi, melakukan pembinaan wilayah beserta segenap kekuatan rakyat untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan.”

Aparat Danramil memandang bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan peranti lunak dan ketentuan dari komando atas terlepas apakah efisien, efektif atau tidak, terlepas secara operasional berdampak langsung pada masyarakat dia tidak memikirkan, karena instruksi atasan demikian.

Pada kesempatan lain wawancara yang dilakukan terhadap seorang tokoh masyarakat tentang kondisi pemberdayaan wilayah di

Kodim 1408/BS Makassar yakni H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc. pada tanggal 18 Agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat membantu kestabilan Kota Makassar, misalnya keterlibatan dalam pengamanan, kebersihan, dan kepedulian dalam kegiatan sosial. Secara umum saya kira masyarakat tidak begitu paham tentang pemberdayaan wilayah pertahanan sehingga sulit rasanya untuk berpartisipasi aktif pada hal-hal yang tidak diketahui. Kalau bela negara secara umum masyarakat sangat paham tentang kewajiban setiap warga negara untuk melakukan bela negara, tetapi wujud kerjasama dengan Kodim tidak jelas sehingga masyarakat juga tidak tahu betul harus melakukan apa.”

Saat ini yang terjadi adalah perbedaan persepsi yang menyolok antara aparat Kodim dengan elemen masyarakat tentang pemberdayaan wilayah pertahanan, karena terbatasnya upaya sosialisasi oleh Kodim tentang pemberdayaan wilayah pertahanan itu sendiri, termasuk wujud kerjasama yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung Kodim, mereka pun masih belum memahaminya secara pasti operasional yang seharusnya dilakukan.

Demikian pula hasil wawancara terhadap kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar Arum Spink, S. Ag Direktur Rumah Ide To Panrita, Ketua KPU Bulukumba pada tanggal 18 Agustus 2013 secara umum menyatakan pentingnya peran organisasi Kodim di wilayah karena mampu meredam berbagai konflik dan gejolak di masyarakat secara luas, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai hal yang berat

untuk diselesaikan mampu diperankan oleh Kodim. Bantuan Kodim antara lain meredam berbagai konflik dan tawuran antar kelompok masyarakat, membantu aktif kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu bencana alam, kebakaran, serta menyadarkan berbagai hal berkenaan pentingnya persatuan dalam bingkai NKRI.”

Demikian pula hasil wawancara terhadap kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar Dr. H. Nurman Said, MA. Ketua Komisi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, seorang dosen Fak Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar pada tanggal 19 agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar sudah pasti sangat dirasakan sebagai sebuah kekuatan, bahwa kalau ada tentara di sekitarnya secara psikologis memberikan rasa aman, sangat membantu karena aparat Kodim menjadi bagian masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup disiplin, tertib, bersih, dan sering melakukan kerja bakti, justru memberi pengaruh yang sangat positif dan menjadi teladan masyarakat dalam kehidupan sosial. Dari segi pertahanan bagi masyarakat kurang begitu dirasakan, lebih dirasakan peran Kodim dalam kehidupan sosial. Masyarakat tidak mau tahu bila mendapat masalah apakah itu Koramil atau Polsek yang pasti ada tempat mengadu untuk mendapatkan perlindungan.”

Dari dua wawancara di atas dapat diketahui bahwa kehadiran Kodim masih sebatas dianggap sebagai institusi yang mampu secara psikologis menenteramkan masyarakat, mengatasi tawuran, perkelahian masyarakat, aktif dalam berbagai kegiatan social kemasyarakatan, dan melindungi masyarakat tanpa memikirkan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan dan tanpa memandang perbedaan fungsi dengan pihak kepolisian.

Untuk mendalami tentang peran aspek pengorganisasian terhadap upaya pemberdayaan wilayah pertahanan dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap aktivis LSM, akademisi, dan praktisi hukum tentang kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap Sdr. Muhammad AY, S.Ip., M.Si. (Aktivis LSM Lembaga Demokrasi dan Otonomi Makassar) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat membantu masyarakat karena Kodim memiliki anggota dan bersentuhan langsung sehingga dapat mengetahui setiap permasalahan yang terjadi dan memberikan solusinya. Peran intel Kodim cukup penting dalam mengantisipasi ancaman unjuk rasa masyarakat, partisipasi masyarakat terhadap upaya Kodim akibat keterbatasan personel telah disiasati dengan cukup kreatif yakni melalui kegiatan Bantuan Komunikasi (Bankom) seperti halnya merekrut beberapa anggota masyarakat dari berbagai lapisan/kelompok untuk menjadi informan, sebagai upaya deteksi dini terhadap suatu kerusakan atau kegiatan negatif yang mengancam NKRI ataupun permasalahan lokal lainnya.”

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu memahami pentingnya upaya pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan karena lebih menganggap sisi positif pentingnya fungsi intelijen dan kelompok ormas yang membantu Kodim sebagai informan dalam meredam unjuk rasa, demonstrasi, dan ancaman lain dari masyarakat. Masyarakat seolah dipaksa untuk terlibat dalam permasalahan dan konflik kepentingan dalam pengurusan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lokasi Kodim yang di dalam kota dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan seperti tertuang dalam wawancara lain terhadap aktivis LSM, akademisi, dan praktisi hukum tentang kondisi pemberdayaan aparat teritorial di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap Sdr. Arief Wicaksono, S.Sos, MA. (Dosen Fakultas Sospol Univ 45 Makassar) pada tanggal 19 Agustus 2013 yang menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar saya pikir cukup membantu masyarakat karena lokasinya di dalam kota sangat strategis

Dalam upaya pengendalian keamanan ketertiban, persoalan bela negara relatif baik, hanya ada persoalan yang harus diperhatikan yakni masalah internal masyarakat berupa gesekan sosial, masalah rivalitas organisasi TNI dan Polri, dan konsumsi masyarakat atas produk-produk globalisasi seperti televisi. Kegiatan Kodim juga sangat terbatas yang diekspos ke masyarakat luas membuat kepedulian masyarakat juga rendah.”

Pandangan tokoh masyarakat pun tidak jauh berbeda bahwa sampai saat ini Kodim lebih dipandang sebagai pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban yang seharusnya masuk ke dalam ranah pihak Kepolisian RI dan memandang Kodim sebagai symbol pemadam kebakaran bila di masyarakat terjadi kerusuhan sosial. Disamping itu menunjukkan bahwa peran serta Kodim dalam kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan sangat terbatas sehingga masyarakat luas tidak memahaminya.

Wawancara terhadap aktivis LSM, akademisi, dan praktisi hukum tentang kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS

Makassar yang dilakukan terhadap Sdr. Hazairin (Aktivis LSM LEDO dan Praktisi Hukum) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat membantu masyarakat masih sering melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, mendukung kegiatan mahasiswa terutama transportasi. “

Pada wawancara lain tentang kondisi aspek pengorganisasian dan pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap Sdr. Muh (Aparat Pemda Provinsi Sulsel) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat membantu masyarakat dalam aspek keamanan dan sosial kemasyarakatan. Kodim cukup peduli, terbukti dengan seringnya memberikan bantuan kepada masyarakat, terkadang turun langsung dalam bencana alam dan dengan adanya kegiatan TMD (Tentara Masuk Desa).”

Secara umum dari hasil dua wawancara di atas menyoroti sisi yang sama bahwa tokoh masyarakat pun masih memandang bahwa Kodim lebih dominan dipandang sebagai organisasi keamanan dan social kemasyarakatan, bukan lembaga yang mengembangkan pembinaan territorial dan upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di masyarakat. Kondisi ini dapat dipahami karena keterbatasan sosialisasi dan terbatasnya kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan dan hajat masyarakat khususnya bidang bela Negara di masyarakat.

Menyikapi wawancara yang dikemukakan di atas, diambil sebuah kesimpulan pengamatan bahwa pengorganisasian dalam kondisi pemberdayaan aparat teritorial dalam rangka manajemen pertahanan yang diemban Kodim 1408/BS Makassar selama ini belum optimal walaupun telah tumbuh kesadaran akan kehadiran Kodim di tengah-tengah masyarakat dan memahami pentingnya pengorganisasian potensi nasional, yang sejalan dengan upaya peningkatan dan perbaikan fungsi pembinaan dan pelaksanaan teritorial yang sesuai visi, misi, tujuan, dan asas yang telah digariskan dalam pelaksanaan wilayah pertahanan, dengan kendala peranti lunak dan rendahnya partisipasi rakyat.

4.2 Kemampuan Personel

Kemampuan personel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang telah tersedia dalam organisasi Kodim 1408/BS didalam melakukan pengelolaan segala potensi dinamika kegiatan untuk mengupayakan terwujudnya Sishankamrata sebagai sebuah kemampuan kekuatan nasional secara total dan integral dengan komponen utama personel yang mengayomi, menjaga, memelihara, dan melakukan pembinaan atas segala potensi integritas wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Komponen utama dari pertahanan nasional adalah andil dari kemampuan personel Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI

AD, TNI AL, dan TNI AU sebagai personel yang telah dipersiapkan, dilatih dan diprofesionalkan untuk mengembangkan segala potensinya menjaga Sishankamrata dalam melakukan pemberdayaan pengwilayah dalam suatu negara.

Kemampuan personel yang penting dan utama yang dibutuhkan dalam pemberdayaan pengwilayahan adalah: 1) kemampuan personel dalam sebuah komando pengwilayahan, 2) ketersediaan personel, dan 3) profesionalisme sumber daya personel di dalam mewujudkan pemberdayaan wilayah Sishankamrata dalam suatu wilayah negara dan bangsa.

1. Kemampuan personel dalam suatu komando pengwilayahan (Kowil)

Kemampuan personel dalam suatu kowil diartikan sebagai sebuah keberadaan personel yang siap siaga secara langsung maupun tidak langsung berada dalam sebuah komando untuk melaksanakan operasi di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan untuk mencegah, menangkal, dan mengatasi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang mengganggu keamanan dan ketahanan nasional, lokal dan pengwilayahan, secara siap personel disiagakan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, dan bahaya suatu pengwilayahan.

Kemampuan personel yang dimaksud adalah melakukan upaya pencegahan, penangkalan, gangguan, dan bahaya dalam suatu pengwilayahan telah disiapkan personel yang ada dalam suatu wilayah. Kemampuan personel ini disiapkan dan disediakan untuk mengamankan, memelihara, memulihkan, dan memperbaiki sebuah kondisi melalui kemampuan personel untuk melakukan pemberdayaan pengwilayahan sesuai fungsi dan pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh personel yang siap dengan kemampuan yang telah diandalkan.

Dalam rangka kegiatan operasional militer dalam suatu wilayah, kemampuan personel sangat dibutuhkan untuk memperkuat penyelenggaraan operasi pencegahan, operasi penindakan, operasi perlawanan wilayah, operasi serangan balas dan operasi pemulihan keamanan, tentunya secara maksimal akan memanfaatkan kekuatan kemampuan personel untuk menyelenggarakan dan menangani tindakan operasional dalam menghadapi gerakan separatisme bersenjata/tanpa senjata dalam berbagai konflik horizontal, perbantuan, dalam melakukan penanganan dari kegiatan terorisme atau kegiatan operasi bantuan kemanusiaan dengan melakukan tindakan dan koordinasi dengan aparat menghadapi berbagai ancaman, gangguan, dan bahaya yang dapat menyulut disintegrasi pengwilayahan.

Guna menunjang dan mendukung operasi tempur pada operasi militer untuk perang, nonperang dan kemanusiaan, maka kemampuan personel selalu disiagakan sebagai personel yang tanggap dalam mengemban tugas pemberdayaan wilayah guna mewujudkan kesemestaan, kerakyatan, dan pengwilayahan ketahanan suatu bangsa dan negara. Kemampuan personel dibutuhkan dalam suatu Kodim untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan menyiapkan pemberdayaan yang terpadu sesuai dengan potensi personel yang tersedia.

Kemampuan personel dalam suatu komando dibedakan atas fungsi organik militer dan fungsi non-organik militer. Fungsi organik militer meliputi segala upaya dalam pengembangan kemampuan potensi personel meliputi pekerjaan dan berbagai kegiatan di segala bidang baik di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, dan manajemen dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi personel dengan baik. Sedangkan fungsi non-organik militer diharapkan kemampuan personel untuk mampu ikut berpartisipasi dalam membantu menyukseskan tujuan pembangunan nasional, senantiasa dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aspek perbantuan dalam memperbagai kegiatan bencana alam, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan ketertiban dan keamanan serta senantiasa

diterjunksikan dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan.

2. Ketersediaan personel

Ketersediaan personel yang berkaitan dengan kondisi pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan yang dimaksud adalah tersedianya sumber daya manusia personel yang mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah kewenangan dan tanggung jawab dalam mendukung berbagai kegiatan perencanaan dan pengendalian kemampuan Kodim 1408/BS sebagai perwujudan postur prajurit yang memiliki integritas jati diri sebagai prajurit pejuang yang terdidik, terlatih, terbina yang telah diamanahkan sebuah norma dan doktrin yang berlaku.

Ketersediaan personel ini menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Kodim untuk mengemban tugas dalam melakukan wilayah pertahanan sesuai dengan aspek perbantuan yang meliputi: 1) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan, 2) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan 3) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga tugas ini membutuhkan ketersediaan personel yang harus terorganisir dalam empat jabatan yang saling terkoordinasi yaitu: 1) jabatan kesatuan meliputi eselon pimpinan,

komandan distrik militer (Dandim), 2) eselon pembantu pimpinan terdiri dari Kasdim, Pasintel, Pasiops, Pasimin, Pasiter, dan Pabung, 3) eselon pelayanan, 4) eselon pelaksana terdiri dari Danramil dan Dan/Unitinteldim. Keempat eselon ini dibuat dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan ketersediaan personel.

Ketersediaan personel pada Kodim 1408/BS Makassar terdiri dari Makodim, Koramil-Koramil pada tingkat kecamatan, Babinsa-babinsa yang ditempatkan pada tingkat kelurahan/desa. Kodim 1408/BS Makassar selaku kesatuan komando kewilayahan memiliki ketersediaan personel sesuai dengan kebutuhan jumlah personel dan jabatan yang optimal, dengan latar belakang kemampuan dan keahlian yang disiapkan sesuai tugas dan fungsinya untuk mampu melaksanakan perannya dalam mendukung optimalisasi dan efektivitas pengendalian komando teritorial.

Kekuatan personel Kodim 1408/BS Makassar telah distandarkan sesuai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) Kodim (Orgas Kodim), Kodim dengan wilayah lebih dari satu kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Kasad, Nomor Perkasad/19/IV/2008 tanggal 8 April 2008 yaitu Makodim sebanyak 351 orang yang terdiri dari militer 299 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 52 orang, sedangkan Koramil dengan wilayah lebih

dari satu kecamatan sebanyak 12 orang yang terdiri dari militer 9 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 3 orang. Dengan jumlah personel yang demikian maka kemampuan personel yang perlu dimiliki dari aspek pengetahuan minimal personel yang ada sudah memiliki pendidikan setingkat sekolah lanjutan atas, kemudian didukung oleh pendidikan spesialisasi sesuai dengan jabatan masing-masing dengan mengacu pada persyaratan tersebut walaupun jumlah personelnnya sedikit, tetapi kinerja menjadi tetap optimal. Kemampuan ini tentunya akan menjadi hal penting sesuai pernyataan pada manajemen strategik tentang pengembangan sumber daya manusia jangka panjang.

Pemenuhan personel sesuai organisasi dan tugas Kodim sesuai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) adalah persyaratan mendasar dihadapkan kepada pelaksanaan operasional Kodim dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga dengan sumber daya manusia yang tentunya tidak terlepas dari dasar untuk menjadi prasyarat di dalam memberdayakan komando wilayah yang saat ini meliputi keterampilan di bidang pengetahuan dan teknik maupun kepemimpinan yang memberikan gambaran yang jelas untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah, sehingga apabila aparat Kodim 1408/BS Makassar memiliki keterampilan maka

komponen cadangan dapat dikembangkan oleh aparat teritorial tersebut.

3. Profesionalisme sumber daya personel

Ditilik dari perspektif keterampilan militer secara universal profesionalisme militer mengandung dua aspek yakni: pertama, aspek kompetensi/keterampilan militer seperti menembak, bermanuver, taktik bertempur, berkelahi bahkan membunuh musuh dan sebagainya. Kedua, jiwa/karakter militer (*military character*) yang sangat dipengaruhi atau dibentuk oleh etika keprajuritan, seorang prajurit yang pandai menembak atau mempunyai naluri berkelahi misalnya tidak dapat disebut profesionalisme manakala sikap dan perilakunya tidak digunakan dan diarahkan oleh etika keprajuritan. Demikian pula dengan profesionalisme personel satuan komando kewilayahan Kodim 1408/BS Makassar selain dibentuk dari pembinaan integritas antara jati diri pejuang prajurit dan prajurit pejuang, juga disiapkan dan dilengkapi dengan kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya melalui jenjang pembinaan pendidikan, pelatihan, dan penugasan.

Profesionalisme juga dibentuk dengan melengkapi personel dengan alat peralatan, sarana dan prasarana yang memadai sesuai TOP/DSPP, serta diberikannya kesejahteraan yang mencukupi berupa kesejahteraan materil (gaji dan tunjangan yang baik) maupun kesejahteraan immateril (moril yang tinggi). Dihadapkan

kepada profesionalitas personel Kodim 1408/BS Makassar maka prasyarat pemenuhan pengisian personel profesional harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Komandan Kodim (Dandim) dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel dan telah mengikuti pendidikan Seskoad dan/atau Susdandim, pendidikan ini merupakan prasyarat yang harus dimiliki untuk bisa memimpin Kodim, dengan prasyarat dan kemampuan yang diperlukan di atas tentunya Dandim dapat mengimplementasikannya di lapangan secara baik.
- b. Kepala Staf Kodim (Kasdim) dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor dan telah mengikuti pendidikan Selapa dan Suspater, pendidikan ini merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh Kasdim untuk membantu Dandim, sebagai orang yang membantu Dandim tentunya dengan kemampuan yang dimilikinya harus dapat memberikan kontribusi yang baik, sehingga tugas Kodim dapat berjalan dengan baik.
- c. Perwira Seksi Intelijen (Pasiintel) dijabat oleh Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dan telah mengikuti pendidikan/kursus Suspaintel dan Suspater, sebagai aparat Intel harus mampu menjadi mata dan telinga Dandim untuk mencari dan

menemukan informasi yang ada di wilayah secara cepat dan akurat.

- d. Perwira Seksi Operasi (Pasiops) dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dan telah mengikuti pendidikan/kursus Suspaops dan/atau Suspater yang harus mampu menyiapkan/menyusun rencana pengerahan kekuatan dan mengorganisir personel yang ada untuk mengatasi permasalahan yang timbul di wilayah secara cepat dan tuntas.
- e. Perwira Seksi Administrasi (Pasimin) dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dan telah mengikuti pendidikan/kursus Suspapers, Suspaminlog dan/atau Suspater. Dengan kemampuan yang ada Pasimin dituntut untuk bisa mencatat dan mendata personel sebagai kesiapan untuk mendukung Pasiops di dalam menghadapi permasalahan yang timbul.
- f. Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) dijabat oleh Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dan telah mengikuti pendidikan/kursus Suspater. Pasiter dengan kemampuan yang ada harus dapat memahami tentang kondisi wilayah sebagai kontribusi kepada Dandim, data-data yang didapat dari aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial merupakan data awal yang menjadi masukan kepada komandan.

- g. Perwira Penghubung (Pabung) dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Mayor dan telah mengikuti pendidikan/kursus Selapa dan Suspater. Sebagai pembantu Dandim untuk mengkoordinasikan tugas kepada komponen lain di wilayah.
- h. Komandan Unit Intelijen Kodim (Danunitinteldim) dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan dan telah mengikuti pendidikan Kursus Suspaintel dan Suspater. Sebagai unsur terdepan untuk mencari keterangan data untuk disampaikan kepada Pasi Intel.
- i. Komandan Koramil (Danramil) dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dan telah mengikuti Susdanramil dan/atau Suspater. Danramil adalah komandan terdepan dari unsur Kodim yang mempunyai peran dan tugas untuk mengamankan wilayah kecamatan.
- j. Kepala Kelompok Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kapoktuud) dijabat oleh Bintara Tinggi (Bati) Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan dan telah mengikuti pendidikan/kursus Susbamin dan/atau Susbater, bertugas menangani masalah administrasi di kantor Kodim.
- k. Bintara Pembina Desa (Babinsa) dijabat oleh Bintara berpangkat Serda sampai dengan Serma dan telah mengikuti pendidikan/kursus Susbabinsa dan/atau Susbater. Sebagai pembantu Danramil untuk membina masyarakat di wilayah

(karena kekurangan personel Babinsa bisa di isi oleh pangkat Kopda sampai Serma).

Uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, didukung oleh teori perintah, teori pengembangan sumber daya manusia, teori profesionalisme dan teori keunggulan. Bahwasannya di dalam melakukan pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan, diperlukan adanya teori perintah atau lazim disebut *command theory*. Teori perintah ini diperkenalkan oleh Weithre (2008:33) menyatakan bahwa negara dan bangsa yang kuat terletak pada kemampuan pimpinan dalam memerintah. Memerintah dari suatu pemerintahan adalah adanya kesatuan tindakan dan untuk selalu menyatukan, memadukan, mengintegrasikan, dan mengwilayahkan kekuatannya dalam suatu perintah kekuasaan.

Beranjak dari teori perintah ini, bertautan dengan teori pengembangan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Dessler (2004:19) bahwa keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam melakukan pemberdayaan ditentukan oleh kemampuan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam sebuah negara dan bangsa identik dengan keberadaan sumber daya pemerintah dalam mewujudkan aparatur negara yang memiliki kemampuan sesuai tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman, dan penguasaan terhadap bidang kerja yang ditekuninya.

Beranjak dari teori pengembangan sumber daya manusia, maka personel TNI dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemberdayaan wilayah. Teori profesionalisme yang dikemukakan oleh Johnson dan Lewis (2004:36) menyatakan bahwa profesionalisme kerja adalah orang yang memiliki prestasi, keunggulan, daya tanggap, memahami serta memiliki dedikasi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Ini berarti TNI dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi dengan mampu mengembangkan prestasi pertahanan berdasarkan keunggulan dalam melakukan penangkalan dari berbagai ancaman dan gangguan sesuai dengan daya tanggap dengan tingkat pemahaman dan dedikasi Sapta Marga dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan bangsa dan negara. Atas dasar inilah, maka TNI menjadi tulang punggung bagi negara dalam rangka mewujudkan pertahanan Sishankamrata yang sesuai dengan teori keunggulan yang dikemukakan oleh Meidjer (2006:49) menyatakan bahwa keunggulan suatu ketahanan dan pertahanan yang dimiliki oleh negara adalah kehormatan dan kedaulatan dalam menjaga keutuhan wilayah negaranya.

Berdasarkan hasil observasi mengenai kondisi pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar dilihat dari kemampuan personel dalam sebuah komando pengwilayahan, ketersediaan personel, dan profesionalisme

sumber daya personel untuk melakukan sebuah tugas dan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan wilayah.

Menyikapi hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Dandim, Kasdim, para Danramil, dan kepada para tokoh masyarakat, tokoh Pemda, serdadu aktivis LSM dan ormas untuk menanyakan secara mendalam tentang pentingnya kemampuan personel dalam rangka meningkatkan kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar. Berikut petikan wawancara kepada salah seorang Danramil yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2013 dengan inisial Arn menyatakan:

“Kemampuan personel dalam rangka meningkatkan pemberdayaan wilayah tidak terlepas dari adanya pengerahan kekuatan nasional secara total, integral dengan menggunakan semua komponen dalam rangka mendukung, mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, untuk menjamin keutuhan, kebersatuan dan mengamankan kepentingan nasional dari berbagai upaya yang dapat mengganggu atau membahayakan wilayah nasional”.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa kemampuan personel yang ada relevan dengan pengerahan kekuatan nasional dalam menjaga yurisdiksi wilayah nasional, seperti halnya TNI maka kemampuan yang ada sesuai dengan pangkat dan jabatan yang disandanginya sekarang. Bagi aparat teritorial di satuan kewilayahan maka tugas mereka adalah membina teritorial dan memberdayakan wilayah pertahanan sesuai tuntutan perundangan yang berlaku dipandang sudah cukup memadai.

Selanjutnya pendalaman wawancara juga menanyakan kepada Kasdim 1408/BS mengenai ketersediaan personel yang diwawancarai pada tanggal 13 Juli 2011 dengan inisial Ign yang memberikan tanggapan atas pengembangan pertanyaan yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:

“Saat ini Kodim 1408/BS Makassar belum memiliki personel yang memadai untuk melakukan penghimpunan, penangkalan, pertahanan, dan perlindungan semua potensi pengwilayahan dari berbagai gangguan, ancaman, dan bahaya dengan menyiapkan personel baik fungsi organik militer dan nonmiliter dalam segala pekerjaan dan kegiatan baik di bidang intelijen, operasional, personel, logistik, teritorial, dan manajemen dalam melindungi pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan.”

Responden menilai bahwa ketersediaan personel yang ada saat ini di Kodim belum mampu untuk menjalankan fungsi dan tugas pokok Kodim secara optimal. Tentu saja hal di atas berpengaruh pada ketersediaan personel pada aspek lain, untuk melihat kesiapan personel yang bersifat nonmiliter dalam menjalankan fungsi pembinaan teritorial kepada seluruh komponen bangsa dan negara untuk berpartisipasi menjaga dan memelihara keutuhan suatu negara. Wawancara dilakukan dengan para Danramil pada tanggal 13 September 2011 dengan inisial Dew, sebagai berikut:

“Ketersediaan personel non-fungsi militer juga dididik, dilatih, dibekali dan diberikan orientasi untuk menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan pemberdayaan pengwilayahan melalui pendekatan nonmiliter seperti ikut berpartisipasi dalam ikut membantu tugas-tugas pemerintah, menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai perbantuan bencana alam dan tindakan kemanusiaan, sehingga pengwilayahan dalam sebuah wilayah

pertahanan dapat terwujud secara kondusif dari aspek pengamanan dan terpeliharanya ketenteraman suatu wilayah masyarakat”.

Menurut responden diatas diketahui bahwa ada wadah lain untuk menyiapkan personel non-fungsi militer untuk menangani tugas perbantuan seperti bencana alam, tindakan kemanusiaan, dan tugas memelihara ketenteraman masyarakat, yang sebenarnya juga menjadi bagian tugas Kodim itu sendiri.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara untuk mengetahui dan memahami penilaian Koramil tentang profesionalisme personel yang ada saat ini berdasarkan komposisi jabatan profesionalisme yang dimiliki oleh Kodim 1408/BS Makassar. Wawancara dilakukan dengan Danramil pada tanggal 20 Juli 2013 dengan inisial Nar , sebagai berikut:

“Pada prinsipnya profesionalisme prajurit Kodim sebagai tentara yang memiliki dedikasi fungsi militer dan nonmiliter berupaya untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme berdasarkan jabatan yang diemban. Profesionalisme ini merupakan warna dan corak bahwa para personel telah siap dan memahami apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan pembinaan, yang harus dijaga dan harus dipertahankan dalam rangka mewujudkan kesemestaan, keutuhan, integritas dan kedaulatan bangsa dan negara dalam rangka mengemban tugas profesionalisme yang mulia sebagai prajurit pejuang dan Sapta Marga”.

Sehubungan dengan profesionalisme para personelnnya Dandim 1408/BS menyatakan antara lain, bahwa:

“Sampai saat ini, masih banyak Babinsa yang tidak memahami akan tugasnya selaku pembina desa/kelurahan, karena kurangnya pengawasan melekat dan pembinaan sehingga

sering terjadi pelanggaran seperti laka lalin, judi, absen tanpa keterangan. Demikian pula Babinsa yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas pokoknya karena keterpengaruhan lingkungan dan faktor materiil, terbatasnya penguasaan IT (ilmu dan teknologi), hal ini bisa menjadikan krisis kepercayaan Babinsa dalam melaksanakan tugas. Pada sisi lain terhadap profesionalisme prajurit Kodim 1408/BS seorang tokoh masyarakat menyatakan masih kurang kualitasnya karena masih terdapat anggota Kodim yang melanggar aturan hukum misalnya terlibat kasus narkoba dan masih sering main hakim sendiri terhadap masyarakat sipil.”

Wawancara tentang kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar menyangkut masalah profesionalisme prajuritnya maka yang dianggap cukup krusial menurut Dandim 1408/BS yang diwawancarai pada tanggal 21 Juli 2013 dengan inisial Mar menyatakan:

“Yang sampai saat ini menghambat operasional kegiatan dan program Kodim adalah perbedaan level organisasi Kodim yang dipimpin seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel TNI AD dengan Poltabes Makassar yang dipimpin oleh Komisaris Besar (Kolonel Polisi) sehingga cukup mengganggu dalam koordinasi dan kerjasama lain. Secara internal maka jumlah Babinsa di tiap kelurahan yang awalnya satu orang dipandang masih kurang dan belum optimal mendukung tugas pokok Kodim. Jumlah personel yang secara kuantitas baru terpenuhi 90% dengan keterbatasan SDM, menjadikan kualitas personel Kodim terutama Babinsanya mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat majemuk yang cenderung berpikiran kritis dan maju dengan latar belakang pendidikan relatif tinggi.”

Hasil dua wawancara di atas menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme di Kodim sendiri cukup memprihatinkan terutama pada kalangan Babinsa yang terbatas penguasaan iptek dan IT, serta keterbatasan kemampuan berkomunikasi sosial dengan masyarakat

lingkungannya. Juga perbedaan level organisasi Kodim dengan mitra Polrestabes membuat SDM prajurit yang tersedi pun cenderung mengalami kendala.

Ikhtisar hasil wawancara terhadap kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar menyangkut aspek profesionalisme personel yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc. pada tanggal 18 Agustus 2013 menyatakan:

“Terhadap keterbatasan SDM Kodim yang mayoritas hanya tamatan SMA bisa disadari karena dibandingkan dengan dinamika lingkungannya dan dibandingkan dengan lembaga institusi lain di sekitarnya ditambah keterbatasan sarana prasarana menjadikan upaya operasional Kodim tidak optimal.”

Demikian pula wawancara terhadap kondisi pemberdayaan aparat teritorial khususnya bidang profesionalisme personel di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar Arum Spink, S. Ag Direktur Rumah Ide To Panrita, Ketua KPU Bulukumba pada tanggal 18 Agustus 2013 menyatakan:

“Tentang kualitas profesionalisme personel Kodim menurut saya masih sangat kurang dan lemah. Pada era modernisasi dan kecanggihan teknologi harusnya diikuti oleh setiap personel, harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan masyarakat yang relatif tinggi. Kalau lulusan SMA dan SMP di Kodim maka ini menyulitkan tugas. Hal ini menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok karena tidak optimal dan adanya kendala berkomunikasi dengan masyarakat secara luas.”

Lemahnya sumber daya prajurit Kodim sudah diketahui masyarakat umum, sehingga akan menyulitkan apabila Babinsa dan

aparatus teritorial lainnya harus mengajak dan melakukan sosialisasi kegiatan tertentu maka muncul apriori dan penolakan halus dari masyarakat. Perbedaan level latar belakang pendidikan turut menentukan efektivitas pencapaian program Kodim.

Demikian pula ikhtisar hasil wawancara menyangkut aspek personel terhadap kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar Dr. H. Nurman Said, MA. Ketua Komisi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, seorang dosen Fak Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Sampai saat ini partisipasi masyarakat rendah karena mereka memandang bahwa tugas Kodim terbatas dan rahasia dan dilaksanakan internal Kodim, masyarakat sangat tidak paham. Tentang profesionalisme personel menurut saya tidak ada masalah karena pekerjaan teknis dapat dilakukan dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Yang mendesak diperbaiki menurut saya adalah perbaikan kesejahteraan mereka, perbaikan sarana prasarana kantor dan rumah dinas mereka, sebelum pensiun dapat membeli rumah sehingga tugas pokok dapat optimal.”

Pandangan responden di atas yang tidak memasalahkan SDM Kodim kurang relevan, karena pekerjaan teknis adalah bertempur dengan teknik tempur memang bias, tetapi pekerjaan binter menuntut SDM yang berkualitas karena tuntutan kebutuhan. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap tugas Kodim karena terbatasnya pula sosialisasi program dan organisasi Kodim ke masyarakat luas biasa dipahami.

Pada kesempatan lain wawancara juga dilakukan terhadap aktivis LSM, akademisi, dan praktisi hukum tentang kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar khususnya aspek personel yang dilakukan terhadap Sdr. Muhammad AY, S.Ip., M.Si. (Aktivis LSM Lembaga Demokrasi dan Otonomi Makassar) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Peran intel Kodim cukup penting dalam mengantisipasi ancaman unjuk rasa masyarakat, partisipasi masyarakat terhadap upaya Kodim akibat keterbatasan personel telah disiasati dengan cukup kreatif yakni melalui kegiatan Bantuan Komunikasi (Bankom) seperti halnya merekrut beberapa anggota masyarakat dari berbagai lapisan/kelompok untuk menjadi informan, sebagai upaya deteksi dini terhadap suatu kerusuhan atau kegiatan negatif yang mengancam NKRI ataupun permasalahan lokal lainnya. Berbicara profesionalisme personel maka masih perlu ditingkatkan khususnya dalam penguasaan informasi dan teknologi, seperti halnya internet atau sejenisnya untuk mengantisipasi kejahatan dunia maya (*cyber crime*), perlu menggunakan model pendekatan persuasif dan membenahi arogansi aparat agar tidak terjadi konflik antara aparat dengan masyarakat.”

Pada wawancara lain terhadap aktivis LSM, akademisi, dan praktisi hukum tentang kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap Sdr. Hazairin (Aktivis LSM LEDO dan Praktisi Hukum) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Dipandang dari sudut profesionalisme maka terasa bahwa personel Kodim masih sangat kurang mampu untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sebagai elemen penting dalam konsep bela negara. Paradigma bahwa tentara sebagai satu-satunya institusi penjaga pertahanan negara masih sangat melekat. Partisipasi masyarakat sangat

kurang, cenderung apatis karena melihat bahwa negara sebagai institusi yang melaksanakan hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ditambah lagi carut-marut politik membuat masyarakat cenderung apatis terhadap pertahanan keamanan negara khususnya di masyarakat level bawah (*grass root*).

Wawancara terhadap dua responden secara umum berpendapat sama tentang terbatasnya SDM prajurit Kodim dan saran meningkatkannya dengan penguasaan teknologi tinggi dengan memanfaatkan bantuan masyarakat. Renlam upaya kedahnyanya partisipasi disebabkan dengan sikap apriori dan skeptic masyarakat terhadap pemerintah berkuasa yang cenderung tidak proaktif dalam mengembangkan keamanan Negara.

Ikhtisar hasil wawancara terhadap aparat Pemda tentang kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar aspek personel yang dilakukan terhadap Sdr. Muh (Aparat Pemda Provinsi Sulsel) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Masalah bela negara terkadang masih kurang relevan pelaksanaannya dalam masyarakat. Karena masih sangat sulit pemuda-pemuda kita masuk tentara seperti halnya pendaftaran calon taruna. Berbicara profesionalisme personel maka masih sangat kurang karena masih sering kita jumpai anggota Kodim sendiri yang melanggar aturan misalnya terlibat kasus narkoba dan perbuatan sering main hakim sendiri terhadap masyarakat sipil.”

Menyikapi wawancara yang dikemukakan di atas, diambil sebuah kesimpulan pengamatan bahwa kemampuan personel dalam kondisi pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan yang diemban Kodim 1408/BS Makassar selama ini telah

berjalan dengan cukup baik dengan memperhatikan kemampuan personel dalam sebuah komando pengwilayahan, ketersediaan personel, dan kuantitas personel kurang mencukupi dengan kualitas profesionalisme sumber daya personel belum terukur secara pasti untuk selalu siap siaga di garis depan dalam melakukan kegiatan penghimpunan, penangkalan, pencegahan, pemeliharaan dan melindungi keutuhan, integritas dan kedaulatan wilayah dengan kemampuan personel yang ada sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki.

4.3 Sarana dan Prasarana

Salah satu upaya yang sangat menentukan keberhasilan dari pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan yang diterapkan di Kodim 1408/BS Makassar adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sebuah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kodim dalam mempertahankan wilayah pertahanan. Sarana dan prasarana pendukung diperlukan secara fisik maupun nonfisik meliputi peranti-peranti untuk keperluan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) sesuai dengan tingkatan yang diberikan kepada satuan Kodim.

Persyaratan tersebut dirumuskan secara baku terhadap komponen yang ada di wilayah seperti pangkalan, alat peralatan dan peranti lunak, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh prajurit yang

ada di Kodim akan sesuai dengan tingkatan operasi yang dihadapi. Terlengkapinya satuan Kodim 1408/BS Makassar dengan fasilitas pangkalan meliputi bangunan perkantoran, perumahan, gedung pertemuan, ruang rapat, gedung/fasilitas olahraga, medan dan perangkat latihan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pembinaan satuan dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Kebutuhan sarana/prasarana pangkalan tersebut digunakan dalam rangka mendukung kerja staf Kodim dan operasional kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Kodim, sehingga mekanisme kerja dapat berjalan sesuai kebutuhan nyata. Akan tetapi, ada permasalahan yang dihadapi oleh Kodim dari aspek ini dan sangat mempengaruhi kinerjanya yaitu pangkalan untuk tempat tinggal bagi personel Kodim yang belum ada, sebagian dari personel Kodim berada di luar pangkalan. Oleh sebab itu, hal ini sangat menghambat dari aspek kesiapan operasi, tetapi dari aspek pembinaan masyarakat kondisi ini tentunya cukup baik karena secara tidak langsung personel Kodim sudah menyatu dengan lingkungannya yaitu masyarakat. Inilah yang oleh Dandim dapat dijadikan suatu potensi untuk memelihara hubungan dengan masyarakat di wilayah.

Selanjutnya dalam aspek alat dan peralatan, terlengkapinya satuan Kodim 1408/BS Makassar dengan alat peralatan, sarana dan prasarana yang memadai sesuai TOP/DSPP. Alat peralatan tersebut adalah segala alat peralatan yang memenuhi persyaratan teknis dan

spesifikasi standar TNI, meliputi alat perhubungan (Alhub), alat optik, alat inventaris kantor (Alsintor), kendaraan dan senjata. Untuk Alhub, Aloptik, dan Alsintor yang diperlukan seperti Radio SSB, TRO 24 MS, telepon, faksimil, radio HT, repeater, OHP, sound system, komputer, printer, mesin tik 26" – 27", mesin stensil, mesin foto copy, genset 5KV, TV 21". Untuk kendaraan yang diperlukan seperti Tr 2½ T (1 unit), Tr ¼ T (4 unit), Tr ¼ T Patroli (1 unit), Tr ¾ T (1 unit), bus kecil (1 unit), ambulance (1 unit) dan sepeda motor (20 unit). Sedangkan untuk senjata yang seharusnya tersedia adalah Pistol (17 pucuk) dan senapan (24 pucuk).

Alat peralatan yang tersedia di atas pada dasarnya untuk memberdayakan komando kewilayahan di dalam mengendalikan organisasi, personel, dan memberikan kemampuan di dalam melakukan penanggulangan yang menjadi tugas pokok komando kewilayahan. Selama ini yang banyak menghambat komando kewilayahan di lapangan akibat dari keterbatasan alat peralatan yang dimiliki (di bawah 50% DSPP). Oleh sebab itu alat peralatan yang diperlukan oleh komando kewilayahan sangat penting untuk memberdayakan tugas yang dihadapi.

Berikut sarana prasarana berupa peranti lunak yakni terlengkapinya satuan Kodim 1408/BS Makassar dengan peranti lunak (buku atau data komputer) berupa buku-buku doktrin, buku petunjuk, peraturan-peraturan, perundang-undangan, prosedur tetap, dan buku

lainnya yang diperlukan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas tugasnya. Kebutuhan peranti lunak tersebut selain untuk kepentingan tugas di masing-masing bidang staf juga melengkapi perpustakaan Kodim sebagai referensi bagi seluruh anggota personel Kodim guna menunjang referensi bagi seluruh anggota personel Kodim guna menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya.

Teori yang mendukung yaitu teori kemudahan, teori alat, teori fasilitas, dan teori prioritas. Teori ini digunakan untuk melihat pentingnya kemampuan pertahanan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara dalam melakukan pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan. Teori kemudahan (*easy theory*) dikemukakan oleh Armstrong (1995:74) menyatakan sarana dan prasarana merupakan aspek pendukung untuk mempermudah mencapai tujuan. Ini memiliki relevansi dengan upaya pemberdayaan kewilayahan ketahanan suatu negara yang memerlukan adanya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan militer dan nonmiliter.

Mengembangkan upaya dalam melakukan pemberdayaan pengwilayahan diperlukan adanya penggunaan alat alutista (alat utama sistem senjata) bagi personel Angkatan Bersenjata RI. Teori alat yang dikemukakan oleh James (2003:155) menyatakan bahwa ketersediaan alat persenjataan berat dan lunak menjadi pertimbangan

bagi sebuah pertahanan negara dalam menghalau dan menghambat berbagai ancaman dan serangan dari musuh. Termasuk teori fasilitas kerja yang dikemukakan oleh Allince (2003:95) yang menyatakan bahwa keunggulan suatu armada angkatan bersenjata terlihat dari fasilitas persenjataan yang dimiliki. Ini berarti dalam melakukan pemberdayaan wilayah, tentara membutuhkan fasilitas pendukung. Termasuk dalam hal ini membutuhkan adanya kelengkapan prioritas yang menunjang kemampuan personel. Teori prioritas yang dikemukakan oleh Leijent (2006:31) menyatakan bahwa teori prioritas dalam pemberdayaan wilayah adalah kemampuan mengutamakan pertahanan dan ketahanan dari kekuatan yang dapat melumpuhkan kekuatan pertahanan itu sendiri.

Uraian di atas merupakan ragam teori yang mendukung dalam memahami pentingnya persyaratan mendukung pemberdayaan komando kewilayahan Kodim adalah dengan melengkapi dan mencukupi segala macam sarana dan prasarana pendukung yang meliputi pangkalan, alat peralatan, senjata, kendaraan dan peranti lunak yang memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi standar TNI guna mendukung operasional dan kerja satuan secara maksimal dan optimal. Prasyarat ini merupakan sistem utama yang harus dimiliki, kemudian dapat didukung oleh kemampuan lain yang ada di wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat prasyarat yang sudah dimiliki oleh komando kewilayahan.

Sarana prasarana tersebut harus sesuai dengan mekanisme operasional. Kodim sebagai satuan komando kewilayahan di wilayahnya melaksanakan tugas-tugasnya dengan mekanisme kerja sesuai fungsi, wewenang dan tugasnya yang mengacu pada Peraturan Kasad, Nomor Perkasad/19/IV/2008 tanggal 8 April 2008. Kodim 1408/BS Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Komando Daerah Militer VII/Wirabuana. Adapun dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya Kodim 1408/BS Makassar dibantu oleh koramil yaitu terdapat 12 koramil yang tersebar di tiga wilayah Kota Makassar.

Dalam melaksanakan fungsi utamanya maka Kodim 1408/BS Makassar melaksanakan pembinaan ruang pertempuran, pembinaan daya tempur, pembinaan kesiapan operasi dan pembinaan teritorial. Pembinaan ruang pertempuran adalah menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertempuran di darat dalam rangka operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Pembinaan daya tempur adalah mewujudkan daya tempur kesatuannya yang mampu mendukung tugas pokok Kodam VII/Wirabuana. Pembinaan kesiapan operasi adalah mewujudkan kesiapan kekuatan pendukung dalam rangka penyelenggaraan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Pada sisi lain pembinaan teritorial adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan teritorial, pembinaan perlawanan wilayah,

pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan bakti TNI, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: *pertama*, membantu pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta. *Kedua*, membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, membantu pemerintah dalam memberdayakan komponen pendukung. *Keempat* membantu tugas pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. *Dan kelima*, membangun, memelihara, meningkatkan, dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat.

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Dandim 1408/BS yaitu mengenai sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut:

“Sarana dan prasarana mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan melalui kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan, khususnya menghadapi berbagai kondisi medan fisik dan non-fisik, diperlukan adanya upaya penangkalan dengan

menggunakan sarana dan prasarana berupa alat dan peralatan baik berupa peralatan keras maupun lunak untuk melakukan kegiatan operasi termasuk dalam penyediaan pangkalan perkantoran, perumahan, gedung pertemuan, rapat-rapat, fasilitas olahraga, fasilitas latihan dan pembimbingan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan pemberdayaan wilayah secara terpadu, merakyat, dan pengwilayahan”.

Hasil wawancara di atas dapat dipandang bahwa seorang Dandim harus menyadari pentingnya sarana prasaran agar operasional program kegiatan Kodim dapat dilaksanakan optimal. Tanpa ketersediaan sarana prasarana secara memadai justru akan menambah beban satuan dan pelaksanaan tugas tidak akan optimal.

Pendalaman wawancara kemudian dilakukan kepada Danramil yaitu Hus pada tanggal 8 Agustus 2013 dalam menunjang kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai prajurit, yang menyatakan bahwa:

“Andil sarana dan prasarana baik berupa peranti lunak maupun prasarana pendukung yang sesuai mekanisme operasional, Koramil membutuhkan adanya peranti lunak berupa registrasi dan perlengkapan komputer untuk melakukan penelaahan tindakan operasional, termasuk kebutuhan prasarana pendukung pemberdayaan yang perlu dilengkapi dan disediakan berupa peralatan kendaraan teknis, kantor pendukung, dan kelengkapan sosialisasi untuk pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat solidaritas dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan manajemen pertahanan di daerah pengwilayahan”.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan menanyakan kepada Kepala Staf Kodim pada tanggal 7 Agustus 2013 untuk menanyakan mekanisme operasional pelaksanaan tugas pemberdayaan aparat teritorial sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugas pemberdayaan diperlukan adanya sebuah mekanisme operasional dalam sebuah pemberdayaan sebagai bentuk pendisposisian untuk melakukan pemberdayaan dalam rangka memudahkan personel menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur operasional yang telah digariskan yaitu mengacu kepada pedoman dan peranti yang diperlukan terkait dengan upaya pemberdayaan wilayah dan pembinaan teritorial”.

Wawancara terhadap dua responden di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana yang mendesak diadakan adalah peranti lunak dan peralatan computer yang diperlukan bagi berlangsungnya operasional produk pemberdayaan wilayah pertahanan, justru peranti lunak yang bersifat operasional lebih mendesak karena sampai saat ini keterbatasan peranti lunak menyebabkan siapa berbuat apa dan harus bagaimana membina teritorial belum jelas pedomannya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada elemen tokoh masyarakat, pejabat pemda, dan LSM pada prinsipnya menganggap bahwa peran serta Kodim 1408/ BS dapat dirasakan masyarakat bila memberikan dampak rasa aman dan kondisi yang kondusif di masyarakat, seperti pendapat mantan Bupati Soppeng a.n. Ads tanggal 14 Agustus 2013, sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberdayaan pertahanan oleh Kodim sangat bergantung bagaimana Kodim turut serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam menciptakan ketenteraman masyarakat dalam berusaha dan bekerja dengan tenang, orang tidak melihat lagi itu tugas polisi atau tentara yang penting aman dan kondusif pasti masyarakat akan bangga akan kehadiran TNI AD dan Kodim khususnya. Tapi di sini masih banyak muncul unjuk rasa yang anarkhis, perkelahian antar mahasiswa, dan tingginya angka kriminalitas, saya berharap aparat teritorial ”.

Saat ini yang lebih penting adalah munculnya rasa aman, dan Kodim merupakan bagian dari lembaga yang mampu menenteramkan masyarakat untuk berlindung, tanpa memedulikan keberadaan Kepolisian RI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kamtibmas. Sosialisasi peranti lunak dan undang-undang kepada masyarakat sangat terbatas sehingga persepsi masyarakat terhadap Kodim sangat beragam.

Pada bagian lain wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat dan LSM pada prinsipnya sama, seperti pernyataan Ketua Ketua Kadin Makassar Hen pada wawancara tanggal 15 Agustus 2013 antara lain menyampaikan sinyalemen sebagai berikut:

“Secara konkrit Kodim BS telah terlibat langsung dalam program Pemda seperti Mabaji (Makassar Bebas Banjir), Program Ketahanan Pangan dengan Budidaya Lele, Penanaman Padi Bibit Unggul, dan KKN Terpadu Mahasiswa Unhas. Jadi kemanunggalan TNI rakyat dan fungsi pemberdayaan pertahanan wilayah di Kodim 1408/BS telah dilaksanakan, walaupun terkesan sangat temporal dan kurang bersifat rutin dan belum direncanakan secara optimal”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat kritis yang menemukan di balik kegiatan social kemasyarakatan yang dilakukan Kodim sangat positif, tetapi karena dilaksanakan sangat temporal, kurang rutin, dan perencanaan tidak maksimal menjadikan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan belum optimal pula dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Pada hasil wawancara terhadap kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc. pada tanggal 18 Agustus 2013 menyatakan:

“Tentang sarana prasarana kita tidak tahu persis apa kebutuhan dan kendala di lapangan karena itu menjadi ranah Kodim sendiri. Justru orang luar semakin tidak tahu karena terkesan rahasia tentang tugas pokok Kodim, itu menjadi wilayah Kodim sendiri”.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Kodim bukanlah organisasi yang populer di mata masyarakat, apalagi kegiatan, tugas pokok, dan sepak terjangnya. Bagaimana mungkin akan mendukung kegiatan Kodim sementara masyarakat masih terasa asing dengan lembaga Kodim itu sendiri.

Memahami wawancara tersebut di atas diambil sebuah kesimpulan yang menjadi verifikasi mengenai hasil penelitian tentang sarana dan prasarana yang meliputi fungsi militer dan nonmiliter dalam melakukan upaya pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan dengan menyediakan fungsi militer berupa peranti-peranti untuk keperluan operasi militer perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan tingkatan yang diberikan kepada satuan Kodim dan sarana prasarana nonmiliter berupa fasilitas pangkalan meliputi bangunan perkantoran, perumahan, gedung pertemuan, ruang rapat, gedung/fasilitas olahraga, medan, dan perangkat latihan. Walaupun pada kenyataannya peranti lunak, sarana dan prasarana Alkom, Alhub, dan Alsintor cukup terbatas dibandingkan

dengan tuntutan kebutuhan. Bahkan untuk HT terbatas dan aparat Kodim khususnya Babinsa menggunakan telepon selular pribadi untuk mendukung tugas pokoknya sehari-hari.

BAB V

KENDALA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN APARAT TERITORIALDALAM Mendukung MANAJEMEN PERTAHANAN DI WILAYAH KODIM 1408/BS MAKASSAR.

Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS Makassar ditentukan oleh adanya faktor-faktor tertentu berdasarkan analisis kendala dengan identifikasi data yang dikumpulkan dari hasil observasi penelitian. Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah Kodim 1408/BS Makassar dipicu oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut berupa faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal antara lain berupa keterbatasan pengorganisasian, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM personel Kodim, keterbatasan sarana prasarana Kodim, sedangkan kendala faktor eksternal mencakup kondisi yang berlaku di lingkup luar organisasi Kodim 1408/BS Makassar regional terutama berkaitan dengan Kodam selaku komando atas, kondisi masyarakat Makassar, dan dukungan tokoh dan elemen penting lainnya di masyarakat terhadap setiap upaya pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan.

5.1 Kendala faktor internal.

Terhadap kendala internal, peneliti melakukan wawancara dengan Dandim, Kasdim, dan dengan Danramil, beserta tokoh masyarakat, aparat Pemda, LSM untuk menanyakan secara mendalam tentang beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah di Kodim 1408/BS Makassar.

1. Faktor pengorganisasian.

- 1) Pengelolaan organisasi menyangkut pengelolaan potensi wilayah, fungsi teritorial, pelaksanaan teritorial, visi, misi, dan asas yang diemban Kodim 1408/BS Makassar, terdapat kendala dalam kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat keterbatasan peranti lunak yang mengatur pembinaan teritorial di Kodim, keterbatasan pemahaman personel terhadap visi misi pelaksanaan pembinaan teritorial Kodim, serta masih terdapatnya kendala terhadap manunggalnya TNI rakyat karena kendala sosial kultural di Makassar yang cukup menonjol. Dengan demikian, yang menonjol adalah terbatasnya peranti lunak pemberdayaan wilayah pertahanan siapa berbuat apa belum tersedia dan kepedulian masyarakat terhadap upaya bela negara sangat terbatas.

Pendalaman wawancara untuk melihat faktor kendala dalam kaitannya dengan kondisi pemberdayaan wilayah, dilakukan wawancara dengan Danramil-01/Ujung Tanah pada tanggal 13 Juli 2013 dengan inisial Bur sebagai berikut:

“Wujud pengoperasian pengorganisasian pemberdayaan wilayah pembinaan teritorial yang diterapkan selama ini mengacu pada pedoman pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan. Kendalanya adalah terbatasnya peranti lunak pemberdayaan wilayah pertahanan siapa berbuat apa belum tersedia dan kepedulian masyarakat terhadap upaya bela negara sangat terbatas”.

Akibat kendala keterbatasan peranti lunak menyebabkan di lapangan aparat teritorial gamang akan berbuat tertentu takut salah, demikian pula pejabat Kodim ragu-ragu bertindak. Oleh karena itu, keterbatasan peranti lunak cukup dominan sifatnya dalam menentukan keberhasilan tugas pokok Kodim di wilayah.

2) Berikut petikan wawancara dengan Dandim 1408/BS yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2013 dengan inisial Mar menyatakan adanya kendala menyangkut keterbatasan anggaran, kesulitan mensinergikan kegiatan program dan nonprogram, dan perbedaan level antara pejabat Dandim dengan Kapolrestabes:

“Sampai saat ini menyangkut organisasi di Kodim antara lain masih adanya kegiatan yang memiliki keterbatasan anggaran seperti kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti bela negara dan pembinaan teritorial di

wilayah, sehingga hasil yang dicapai belum optimal. Kendala lain adalah kesulitan mensinergikan antara program komando atas dengan program yang dibuat aparat pemerintah kota Makassar terutama bidang teritorial berupa ketahanan pangan karena keterbatasan lahan di perkotaan untuk mengembangkan program ketahanan pangan. Selanjutnya hal lain yang menghambat adalah perbedaan level organisasi Kodim yang dipimpin Letnan Kolonel TNI AD dengan Polrestabes Makassar yang dipimpin oleh Komisarisi Besar (Kolonel Polisi) sehingga cukup mengganggu dalam koordinasi dan kerjasama lain.”

Terhadap pemberdayaan wilayah pertahanan maka Dandim 1408/BS juga mengeluhkan adanya kendala lain menyangkut rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya bela Negara maupun upaya pertahanan wilayah yang seharusnya dilakukan.

Kendala yang dimaksud dalam optimalisasi tugas pokok anatara lain dapat disarikan dari hasil wawancara berikut :

“Partisipasi masyarakat Makassar dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan cukup rendah karena adanya kepentingan ekonomi keluarga lebih dominan, dan apabila itu dilakukan lebih cenderung dilakukan kepada pihak kepolisian karena mayoritas permasalahan berkaitan dengan masalah hukum dan keamanan sehingga jarang bersentuhan dengan kegiatan Kodim”. Yang dilakukan adalah mem-*back up* kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa di lapangan yang cukup tinggi eskalasinya di Makassar.”

Perbedaan level organisasi Kodim dan Polrestabes, keterbatasan pemahaman tugas Kodim oleh masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat menurut disebabkan karena tinjauan organisasi militer dengan Polri berbeda, bedanya persepsi masyarakat terhadap fungsi Kodim dan

Polrestabes, serta perbedaan level organisasi menyebabkan koordinasi dan kerjasama lain tidak maksimal.

3) Di balik aspek kebutuhan akan organisasi Kodim yang dirasakan langsung oleh masyarakat maka terdapat kendala lain dalam wujud kerjasama dan terbatasnya upaya sosialisasi oleh Kodim, seperti ikhtisar hasil wawancara terhadap kondisi kendala pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc. pada tanggal 18 Agustus 2013 menyatakan:

“Kalau bela negara secara umum masyarakat sangat paham tentang kewajiban setiap warga negara untuk melakukan bela negara, tetapi wujud kerjasama dengan Kodim tidak jelas sehingga masyarakat juga tidak tahu betul harus melakukan apa. Harusnya Kodim sesering mungkin membuat program kegiatan terkait bela negara semacam sosialisasi dan penjelasan-penjelasan yang melibatkan seluruh masyarakat.”

Hasil wawancara terhadap kendalan pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar Arum Spink, S. Ag Direktur Rumah Ide To Panrita, Ketua KPU Bulukumba pada tanggal 18 Agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai hal yang berat untuk diselesaikan mampu diperankan oleh Kodim. Kendala yang masih terjadi adalah karena kurang aktifnya peran serta dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Kodim karena pertama secara umum masyarakat umum tidak tahu apa tugas

dan fungsi Kodim, yang diketahui bahwa TNI memiliki fungsi pertahanan, tetapi tidak mengerti seperti apa wujudnya. Kedua, karena Kodim tidak berupaya untuk menjelaskan perannya sehingga masyarakat menganggap keberadaan Kodim tidak berpengaruh terhadap dinamika masyarakat.”

Dalam wawancara di atas terungkap bahwa tiga kendala utama terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan di lapangan adalah masyarakat tidak tahu tugas dan fungsi Kodim, serta Kodim tidak berupaya menjelaskan perannya. Keterbatasan peranti lunak di Kodim dan keterbatasan SDM prajurit, serta dukungan dana yang minim jadilah Kodim menjadi organisasi yang setengah-setengah dalam menjalankan fungsinya.

4) Demikian pula ikhtisar hasil wawancara terhadap kendala pelaksanaan pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar menyangkut adanya konsentrasi tugas Kodim yang cenderung pada tugas kehidupan sosial dan sebagai organisasi yang terpisah dari kehidupan masyarakat yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Makassar Dr. H. Nurman Said, MA. Ketua Komisi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, seorang dosen Fak Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar dari segi pertahanan bagi masyarakat kurang begitu dirasakan, lebih dirasakan peran Kodim dalam kehidupan sosial. Masyarakat tidak mau tahu bila mendapat masalah apakah itu Koramil atau Polsek yang pasti ada tempat mengadu untuk mendapatkan perlindungan. Paling tidak Koramil memberi perlindungan dan rasa aman, walaupun mereka tahu itu tugas Polisi. Sampai saat ini partisipasi masyarakat rendah karena mereka memandang bahwa tugas Kodim terbatas dan rahasia dan dilaksanakan internal Kodim, masyarakat sangat tidak paham.”

Tidak jauh dari pendapat di atas juga dikemukakan oleh Arief Wicaksono, S.Sos, MA. (Dosen Fakultas Sospol Univ 45 Makassar) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Dalam upaya pengendalian keamanan ketertiban, persoalan bela negara relatif baik, hanya ada persoalan yang harus diperhatikan yakni masalah internal masyarakat berupa gesekan sosial, masalah rivalitas organisasi TNI dan Polri, dan konsumsi masyarakat atas produk-produk globalisasi seperti televisi. Kegiatan Kodim juga sangat terbatas yang diekspos ke masyarakat luas membuat kepedulian masyarakat juga rendah.”

Dua wawancara terakhir menunjukkan masih terdapat kendala krusial di wilayah Kodim sendiri yakni kecurigaan adanya gesekan antara TNI-Polri, terbatasnya produk Kodim yang sampai masyarakat, dan tidak pedulinya masyarakat bahwa Kodim berperan dalam ranah pertahanan bukan kamtibmas. Lemahnya sosialisasi oleh Kodim menjadi alasan mengapa

masyarakat bersikap apriosi terhadap Kodim menjadi alasan mengapa masyarakat bersikap apriori Kodim.

Demikian pula wawancara terhadap aktivis lain tentang faktor kendala dalam pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar yang dilakukan terhadap Sdr. Hazairin (Aktivis LSM LEDO dan Praktisi Hukum) pada tanggal 19 Agustus 2013 menyatakan:

“Tentang bela negara, pasca reformasi di Makassar terjadi gap antara masyarakat dan Kodim sebagai institusi yang menjaga pertahanan negara. Masalah bela negara terkadang masih kurang relevan pelaksanaannya dalam masyarakat. Karena masih sangat sulit pemuda-pemuda kita masuk tentara seperti halnya pendaftaran calon taruna.”

Kendala yang ditemukan dari hasil wawancara terhadap pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial di Kodim 1408/BS Makassar menyangkut adanya konsentrasi tugas Kodim yang cenderung pada tugas kehidupan sosial dan sebagai organisasi yang terpisah dari kehidupan masyarakat dan masih sulitnya masyarakat menembus warganya untuk menjadi anggota TNI (tentara) terutama calon taruna.

4) Seperti halnya yang disampaikan dalam wawancara dengan Dandim 1408/BS pada tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut:

“Kurang aktifnya peran serta dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Kodim karena pertama secara umum masyarakat umum tidak tahu apa tugas dan fungsi Kodim, yang diketahui bahwa TNI memiliki fungsi pertahanan, tetapi tidak mengerti seperti apa wujudnya. Kedua, karena Kodim tidak berupaya untuk menjelaskan perannya sehingga masyarakat menganggap keberadaan Kodim tidak berpengaruh terhadap dinamika masyarakat.”

Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat membantu kestabilan Kota Makassar, misalnya keterlibatan dalam pengamanan, kebersihan, dan kepedulian dalam kegiatan social. Bantuan Kodim antara lain meredam berbagai konflik dan tawuran antar kelompok masyarakat, membantu aktif kegiatan social kemasyarakatan, membantu bencana alam, kebakaran, serta menyadarkan berbagai hal berkenaan pentingnya persatuan dalam bingkai NKRI.

2. Kemampuan personel.

- 1) Kemampuan personel mencakup ketersediaan personel dalam jumlah yang terbatas terutama Babinsa yang belum mampu meng-cover kebutuhan desa dan karakteristik wilayah Makassar, terbatasnya profesionalisme aparat teritorial dari Kodim yang berlatar belakang pendidikan SMA dengan bekal bidang teritorial sangat terbatas, menyebabkan fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan di

Kodim 1408/BS Makassar masih terkendala. Kodim 1408/BS Makassar belum memiliki personel yang memadai untuk melakukan penghimpunan, penangkalan, pertahanan, dan perlindungan semua potensi pengwilayahan dari berbagai gangguan, ancaman, dan bahaya dengan menyiapkan personel baik fungsi organik militer dan nonmiliter dalam segala pekerjaan dan kegiatan baik di bidang intelijen, operasional, personel, logistik, teritorial, dan manajemen dalam melindungi pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan.

Keterbatasan ketersediaan personel dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodim dapat diketahui dari hasil pendalaman terhadap Kasdim 1408/BS (Mayor Ign) pada tanggal 13 Juli 2013 yang menyatakan:

“Secara internal maka jumlah Babinsa di tiap kelurahan yang awalnya satu orang dipandang masih kurang dan belum optimal mendukung tugas pokok Kodim. Saat ini Kodim 1408/BS Makassar belum memiliki personel yang memadai untuk melakukan penghimpunan, penangkalan, pertahanan, dan perlindungan semua potensi pengwilayahan dari berbagai gangguan, ancaman, dan bahaya dengan menyiapkan personel baik fungsi organik militer dan nonmiliter dalam segala pekerjaan dan kegiatan.”

Wawancara di atas menunjukkan perlunya peninjauan terhadap kebijakan jumlah Babinsa untuk tiap keluarahan, karena Makassar di pusat kota dengan dinamika yang

beragam maka dibutuhkan penambahan jumlah Babinsa di tiap kelurahan yang berbeda dengan wilayah luar kota yang dinamikanya cenderung aman terkendali. Selain itu perbedaan tingkat pendidikan dengan masyarakat menuntut peningkatan kualitas SDM di perkotaan.

- 2) Sampai saat ini, kendala utama menyangkut ketersediaan dan profesionalisme prajurit Kodim dalam pemberdayaan wilayah pertahanan adalah masih banyaknya Babinsa yang tidak memahami akan tugasnya selaku pembina desa/kelurahan, karena kurangnya pengawasan melekat dan pembinaan sehingga sering terjadi pelanggaran seperti laka lalin, judi, absen tanpa keterangan. Demikian pula Babinsa yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas pokoknya karena keterpengaruhan lingkungan dan faktor materiil, terbatasnya penguasaan IT (ilmu dan teknologi), seperti yang dikemukakan Dandim 1408/BS (Mar) saat wawancara pada tanggal 21 Juli 2013 yakni sebagai berikut:

“Sampai saat ini masih banyaknya Babinsa yang tidak memahami akan tugasnya selaku pembina desa/kelurahan, karena kurangnya pengawasan melekat dan pembinaan sehingga sering terjadi pelanggaran seperti laka lalin, judi, absen tanpa keterangan. Demikian pula Babinsa yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas pokoknya karena keterpengaruhan lingkungan dan faktor materiil, terbatasnya penguasaan IT (ilmu dan teknologi). Pada sisi lain terhadap profesionalisme prajurit Kodim 1408/BS yang masih kurang kualitasnya karena masih terdapat anggota Kodim yang melanggar aturan hukum misalnya terlibat kasus

narkoba dan masih sering main hakim sendiri terhadap masyarakat sipil.”

- 3) Kendala lain menyangkut profesionalisme prajurit Kodim 1408/BS yang sampai saat ini menghambat operasional kegiatan dan program Kodim adalah perbedaan level organisasi Kodim yang dipimpin seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel TNI AD dengan Polrestabes Makassar yang dipimpin oleh Komisaris Besar (Kolonel Polisi) sehingga cukup mengganggu dalam koordinasi dan kerjasama lain. Hal ini relevan dengan pernyataan Dandim 1408/BS (Mar) pada tanggal 21 Juli 2013 sebagai berikut:

“Sampai saat ini yang menghambat operasional kegiatan dan program Kodim adalah perbedaan level organisasi Kodim dengan Polrestabes Makassar sehingga cukup mengganggu dalam koordinasi dan kerjasama lain. Secara internal maka jumlah Babinsa di tiap kelurahan yang awalnya satu orang dipandang masih kurang dan belum optimal mendukung tugas pokok Kodim. Jumlah personel yang secara kuantitas baru terpenuhi 90% dengan keterbatasan SDM, menjadikan kualitas personel Kodim terutama Babinsanya mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat majemuk yang cenderung berpikiran kritis dan maju dengan latar belakang pendidikan relatif tinggi.”

- 4) Terhadap keterbatasan SDM Kodim yang mayoritas hanya tamatan SMA bisa disadari karena dibandingkan dengan dinamika lingkungannya dan dibandingkan dengan lembaga institusi lain di sekitarnya ditambah keterbatasan sarana prasarana menjadikan upaya operasional Kodim tidak

optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat Makassar H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc pa tanggal 18 Agustus 2013 sebagai berikut:

“Tentang kualitas profesionalisme personel Kodim masih dipandang kurang dan lemah. Pada era modernisasi dan kecanggihan teknologi harusnya diikuti oleh setiap personel, harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan masyarakat yang relatif tinggi. Kalau lulusan SMA dan SMP di Kodim maka ini menyulitkan tugas. Hal ini menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok karena tidak optimal dan adanya kendala berkomunikasi dengan masyarakat secara luas. Ditambah kendala adanya keterbatasan personel yang memiliki bekal pendidikan teritorial melalui bekal pendidikan atau kursus yang diselenggarakan resmi oleh dinas, menambah permasalahan di lapangan.”

- 5) Dipandang dari sudut profesionalisme maka terasa bahwa personel Kodim masih sangat kurang mampu untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sebagai elemen penting dalam konsep bela negara. Hal ini dinyatakan oleh aktivitas LSM, akademisi, dan praktisi hukum Sdr. Muhammad AY, S.Ip., M.Si. pada tanggal 19 Agustus 2013 yakni sebagai berikut:

“Masalah bela negara terkadang masih kurang relevan pelaksanaannya dalam masyarakat. Karena masih sangat sulit pemuda-pemuda kita masuk tentara seperti halnya pendaftaran calon taruna. Berbicara profesionalisme personel maka masih sangat kurang karena masih sering kita jumpai anggota Kodim sendiri yang melanggar aturan misalnya terlibat kasus narkoba dan perbuatan sering main hakim sendiri terhadap masyarakat sipil.”

3. Sarana Prasarana.

- 1) Menyangkut pangkalan Kodim yang cukup terbatas, sarana prasarana perkantoran, keterbatasan alat perhubungan/komunikasi radio, sarana transportasi staf dan Danramil yang sangat terbatas, akan menghambat operasional personel Kodim dalam menjalankan tugas pokoknya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Sarana dan prasarana mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan melalui kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan, khususnya menghadapi berbagai kondisi medan fisik dan non-fisik, diperlukan adanya upaya penangkalan dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa alat dan peralatan baik berupa peralatan keras maupun lunak untuk melakukan kegiatan operasi termasuk dalam penyediaan pangkalan perkantoran, perumahan, gedung pertemuan, rapat-rapat, fasilitas olahraga, fasilitas latihan dan pembimbingan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan pemberdayaan wilayah secara terpadu, merakyat, dan pengwilayahan.
- 2) Andil sarana dan prasarana baik berupa peranti lunak maupun prasarana pendukung yang sesuai mekanisme operasional, Koramil membutuhkan adanya peranti lunak

berupa registrasi dan perlengkapan komputer untuk melakukan penelaahan tindakan operasional, termasuk kebutuhan prasarana pendukung pemberdayaan yang perlu dilengkapi dan disediakan berupa peralatan kendaraan teknis, kantor pendukung, dan kelengkapan sosialisasi untuk pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat solidaritas dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan manajemen pertahanan di daerah pengwilayahan.

Kendala utama yang terjadi pada sarana prasarana lebih cenderung yang bersifat metode kegiatan. Wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Kadin Makassar (Hen) tanggal 15 Agustus 2013 menyampaikan sinyalemen sebagai berikut:

“Secara konkrit Kodim 1408/ BS telah terlibat langsung dalam program Pemda seperti Mabaji (Makassar Bebas Banjir), Program Ketahanan Pangan dengan Budidaya Lele, Penanaman Padi Bibit Unggul, dan KKN Terpadu Mahasiswa Unhas. Jadi kemanunggalan TNI rakyat dan fungsi pemberdayaan pertahanan wilayah di Kodim 1408/BS telah dilaksanakan, walaupun terkesan sangat temporal dan kurang bersifat rutin dan belum direncanakan secara optimal. Program ini terkesan lebih mementingkan kegiatan seremonial dan nonprogram yang sering menyulitkan Kodim sendiri dalam anggaran dan dukungan dana nonprogram.”

- 3) Secara khusus Kasdim 1408/BS (Ign) menyampaikan dalam wawancaranya pada tanggal 21 Juli 2013 bahwa kendala yang ada dalam hal sarana dan prasarana antara lain meliputi fungsi militer dan nonmiliter dalam melakukan upaya pemberdayaan wilayah dalam mendukung manajemen pertahanan dengan menyediakan fungsi militer berupa peranti-peranti untuk keperluan operasi militer perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan tingkatan yang diberikan kepada satuan Kodim dan sarana prasarana nonmiliter berupa fasilitas pangkalan meliputi bangunan perkantoran, perumahan, gedung pertemuan, ruang rapat, gedung/fasilitas olahraga, medan, dan perangkat latihan.

“Walaupun pada kenyataannya peranti lunak, sarana dan prasarana Alkom, Alhub, dan Alsintor cukup terbatas dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan. Bahkan untuk HT terbatas dan aparat Kodim khususnya Babinsa menggunakan telepon selular pribadi untuk mendukung tugas pokoknya sehari-hari.”

Menurut seorang tokoh masyarakat Makassar H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc. Pada tanggal 18 Agustus 2013 dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sampai saat ini partisipasi masyarakat rendah karena mereka memandang bahwa tugas Kodim terbatas dan rahasia dan dilaksanakan internal Kodim, masyarakat sangat tidak paham. Yang mendesak diperbaiki adalah perbaikan kesejahteraan mereka, perbaikan sarana prasarana kantor dan rumah dinas mereka, sebelum pensiun dapat membeli rumah sehingga tugas pokok dapat optimal.”

4) Sampai saat ini menyangkut sarana prasarana di Kodim disampaikan oleh Dandim 1408/BS (Mar) pada tanggal 21 Juli 2013 sebagai berikut:

“Adalah masih adanya keterbatasan sarana prasana perkantoran yang sejak tahun 1947 belum pernah mengalami pemugaran dan tidak layak pakai, keterbatasan sarana angkutan terutama mobil ambulance dan kendaraan jenazah, juga terbatasnya dukungan alat komunikasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan mekanisme sistem komunikasi standar dalam mendukung tugas pokok. Selama ini Babinsa menggunakan alkom pengadaan sendiri. Yang mendesak diperbaiki menurut saya adalah perbaikan kesejahteraan mereka, perbaikan sarana prasarana kantor dan rumah dinas mereka, sebelum pensiun dapat membeli rumah sehingga tugas pokok dapat optimal.”

Dandim sendiri mengeluhkn betapa kondisi prasarana kantor, mobil ambulance, ruang rapat dan sarana angkutan, alat komunikasi sangat memprihatinkan. Maka yang dilakukan adalah menggunakan sarana prasarana yang ada untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan walupun hasilnya tidak akan optimal.

5.2 Kendala faktor eksternal.

1) Kendala yang bersifat eksternal datang dari masyarakat Makassar yang melingkungi kondisi pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial itu sendiri. Secara khusus dalam wawancara dengan Dandim 1408/BS (Mar) pada tanggal 6 Juli 2013 sebagai berikut:

“Rendahnya partisipasi masyarakat Makassar dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan terjadi karena

adanya kepentingan ekonomi keluarga lebih dominan, dan apabila itu dilakukan maka partisipasi dan kepentingan masyarakat lebih cenderung dilakukan kepada pihak kepolisian karena mayoritas permasalahan berkaitan dengan masalah hukum dan keamanan sehingga jarang bersentuhan dengan kegiatan Kodim. Demikian pula terhadap tugas Kodim dalam mengatasi unjuk rasa maka yang diutamakan adalah tindakan preventif daripada penindakan dengan membina masyarakat melalui jaring intelijen dan teritorial sehingga dapat dicegah ataupun dikondisikan tidak terjadi anarkisme. Yang dilakukan adalah mem-*back up* kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa di lapangan yang cukup tinggi eskalasinya di Makassar.”

Responden berpandangan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan karena kepentingan social ekonomi kemasyarakatan dan hukum sehingga cenderung menjadi wilayah polisi, maka masyarakat cenderung berhubungan dengan Kepolisian Ri, demikian pula untuk mengatasi unjuk rasa dan kerusuhan maka TNI (Kodim) hanya mem-*beck up* saja kepolisian, dan bersifat preventif tidak sampai penindakan. Sudah barang tentu Kodim menjadi organisasi yang tidak dibutuhkan sekali kehadirannya.

Bahkan dalam wawancara dengan tokoh masyarakat Makassar H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc. Pada tanggal 18 Agustus 2013 dinyatakan sebagai berikut:

“Secara umum masyarakat tidak begitu paham tentang pemberdayaan wilayah pertahanan sehingga sulit rasanya untuk berpartisipasi aktif pada hal-hal yang tidak diketahui. Kalau bela negara secara umum masyarakat sangat paham tentang kewajiban setiap warga negara untuk

melakukan bela negara, tetapi wujud kerjasama dengan Kodim tidak jelas sehingga masyarakat juga tidak tahu betul harus melakukan apa. Kodim sering tidak membuat program kegiatan terkait bela negara semacam sosialisasi dan penjelasan-penjelasan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga sulit menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bela negara atau pemberdayaan wilayah dalam arti luas.”

Hasil wawancara menunjukkan responden tidak terlalu optimis tentang upaya pemberdayaan wilayah pertahanan oleh Kodim karena Kodim dipandang sebagai lembaga asing yang tidak diketahui masyarakat peran dan fungsinya, masyarakat pun tidak tahu apa yang harus diperbuat.

- 2) Kendala faktor eksternal lain juga dikemukakan oleh Sdr. Muh (Aparat Pemda Sulsel) pada tanggal 19 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa:

“Keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar masih sangat membantu masyarakat dalam aspek keamanan dan sosial kemasyarakatan. Masalah bela negara terkadang masih kurang relevan pelaksanaannya dalam masyarakat.”

Dikalangan masyarakat masih belum mampu menerima secara utuh kehadiran Kodim karena program bela Negara belum dapat dilaksanakan secara optimal, walaupun masyarakat mengakui bahwa keberadaan Kodim sangat membantu masyarakat dalam aspek keamanan dan social kemasyarakatan.

Menurut Dandim 1408/BS terdapat kendala utama berupa tidak adanya dukungan dana nonprogram dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodim seperti dalam pernyataannya pada tanggal 6 Juli 2013 sebagai berikut:

“Kendala utama adalah tidak adanya dukungan dana nonprogram, sementara Kodim 1408/BS selain muatan kegiatan protokoler yang sangat padat juga harus mengembangkan kegiatan bela negara dan teritorial, berupa ketahanan pangan yang tidak didukung ketersediaan lahan di tengah kota.”

Kendala utama di Kodim terungkap dari pernyataan responden yang datangnya dari komando atas dalam hal ini Kodam, yang menuntut pelaksanaan kegiatan terutama nonprogram secara optimal pula. Keterbatasan ini menyulitkan Kodim mengembangkan kegiatan bela Negara secara optimal, terlebih program-program ketahanan pangan dengan kesulitan utama mencarikan lahan di tengah kota.

BAB VI

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN APARAT TERITORIAL DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA

6.1 Manajemen Pemberdayaan.

Manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung pertahanan rakyat semesta di wilayah Kodim 1408/BS Makassar menguraikan rumusan kebijakan, strategi, dan berbagai upaya yang didasarkan pada amanat UU RI No. 17 Th 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dalam manajemen pemberdayaan aparat teritorial pertahanan dalam mendukung manajemen pertahanan.

Pada permasalahan yang muncul dari masyarakat, LSM, dan sebagian masyarakat yang masih menyoroti Kodim 1408/BS Makassar menyangkut sepak terjangnya yang dianggap sering tidak profesional dan kurang proporsional, terlebih pada bidang pertahanan dan keamanan menuntut pengaturan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas, diharapkan mampu mendorong, membimbing, dan menggerakkan penyelenggaraan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan aspek profesionalisme, asas proporsionalitas, sampai dengan tetap terpeliharanya kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan nasional.

Konsentrasi khusus pada fungsi pertahanan yang dilaksanakan Kodim 1408/BS Makassar secara organisatoris diharapkan mampu

mengatasi permasalahan. Pemisahan fungsi secara profesional Kodim 1408/BS Makassar dalam fungsi pertahanan dan Polri dalam fungsi keamanan diharapkan melahirkan konsepsi bagi operasional di lapangan. Karena dari hal tersebut banyak korelasi dan hubungan interdependensi di antara dua peran sentral dalam menegakkan kedaulatan NKRI.

Optimalisasi bidang pelaksanaan tugas pokok sebagai subsubkompartemen startegis menjalankan fungsi pertahanan yang perlu segera dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar dengan tetap menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan dalam bentuk operasional program dan nonprogram satuan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan sistem pemberdayaan wilayah pertahanan secara profesional dan proporsional berdasarkan lingkup pelaksanaan tugas pokok.
2. Perlunya penanganan terhadap kendala faktor internal Kodim 1408/BS dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mendukung manajemen pertahanan yang mencakup pengelolaan organisasi menyangkut pengelolaan potensi wilayah, fungsi teritorial, pelaksanaan teritorial, visi, misi, dan asas yang diemban Kodim 1408/BS Makassar, yang belum

dapat dilaksanakan secara optimal dengan meningkatkan peranti lunak yang mampu mengatur pembinaan teritorial di Kodim, mengatasi keterbatasan pemahaman personel terhadap visi misi pelaksanaan pembinaan teritorial Kodim, serta menyelesaikan kendala terhadap manunggalnya TNI rakyat karena kendala sosial kultural, perlunya meningkatkan pemenuhan Sarana Prasarana menyangkut pangkalan Kodim, sarana prasarana perkantoran, alat perhubungan/komunikasi radio, sarana transportasi staf dan Danramil, sehingga dapat melancarkan operasional personel Kodim dalam menjalankan tugas pokoknya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia personel Kodim secara profesional dan proporsional.

3. Perlunya memantapkan partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan berupa pertahanan rakyat semesta terutama melalui program bela negara. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan di wilayah teritorial yaitu Kodim 1408/BS Makassar dan kemampuan komponen cadangan pertahanan.

4. Perlunya upaya optimal dengan pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara.
5. Perlunya mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mendukung manajemen pertahanan sehingga kendala di lapangan dapat segera diatasi secara proporsional.

6.2 Indikator Keberhasilan dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aparat Teritorial.

1. Menguatnya Kesadaran Bela Negara.

Kondisi yang diharapkan dari keberhasilan optimalisasi bidang pertahanan adalah menguatnya kesadaran bela negara di setiap lapisan masyarakat sebagai implementasi Pasal 30 UUD 1945 yakni tentang bela negara. Kelompok masyarakat dengan bidang dan profesi masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku ikut serta aktif dalam upaya bela negara. Dengan demikian, harus dioptimalkan adalah pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara karena masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara. Manfaat dari bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata. Akan tetapi, lebih jauh dari itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa.

2. Meningkatnya Sistem Pertahanan Negara dalam Mengawal Pembangunan Nasional.

Kontribusi sebagai parameter kondisi meningkatnya kondisi bidang pertahanan dan keamanan antara lain adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dengan tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, meningkatkan daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya NKRI baik dari ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Hal yang perlu segera dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar dalam modernisasi peralatan pertahanan negara dan mereposisi profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar dalam kehidupan sosial politik, mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

3. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat.

Pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Kodim 1408/BS belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya operasional dalam bidang bela negara dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikembangkan

Kodim. Kondisi dapat disadari karena ketidakmengertian masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kodim secara luas, ditambah tidak adanya sosialisasi secara proporsional menjadikan kegiatan Kodim seolah-olah berjalan sendiri-sendiri dengan lapisan masyarakat yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam setiap operasi teritorial. Indikator yang dapat digunakan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dikembangkan Kodim 1408/BS.

6.3 Strategi Optimalisasi.

Strategi yang digunakan dalam mengantisipasi permasalahan adalah dengan menghadapi setiap kendala/permasalahan terhadap bidang pemberdayaan wilayah pertahanan secara dini, komprehensif, dan terpadu. Yang menjadi prioritas adalah pentingnya optimalisasi bidang tugas dan tanggung jawab Kodim 1408/BS guna mendukung manajemen pertahanan dalam rangka pembangunan nasional, antara lain menyangkut peranti lunak berupa peraturan dari komando atas, sarana prasarana bagi terselenggaranya fungsi pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah pertahanan, serta adanya kesatuan visi dan misi dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai peraturan dan amanat undang-undang bidang pertahanan keamanan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan di atas dapat ditempuh strategi sebagai berikut.

1. Meningkatkan profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar.

Untuk memberi posisi yang jelas dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, maka sasarannya adalah terwujudnya profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar secara optimal dalam kepentingan mendukung manajemen pertahanan yang dilaksanakan oleh Kasad dan Pangdam VII/Wrb dengan regulasi hukum, sosialisasi, dan edukasi pemberdayaan wilayah pertahanan.

a. Bidang organisasi.

Organisasi Kodim 1408/BS memiliki Makodim dengan organisasi stafnya dan satuan unsur pelaksanaan adalah Unit Intel Kodim dan Komando Rayon Militer (Koramil) sebanyak 12 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Makassar. Kodim 1408/BS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pangdam VII/Wirabuana. Pada pernyataannya Dandim 1408/BS (Mar) pada tanggal 6 Agustus 2013 disampaikan bahwa:

“Binter sebagai salah satu fungsi yang harus dilaksanakan Kodim 1408/BS dengan karakteristik wilayah kota Makassar yang khusus dan cukup luas ditambah organisasi Polrestabes dipimpin seorang Kolonel (Kombes) maka menyebabkan kompleksitas permasalahan sangat membebani Kodim.”

Dengan memperhatikan perbedaan level yang cukup signifikan hamper di seluruh Kodim Kota di seluruh Indonesia maka diperlukan solusi menyeluruh yakni perlunya pemikiran menaikkan organisasi Kodim yang dipimpin Dandim berpangkat

Kolonel di seluruh Kodim Kota sehingga memudahkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Penyesuaian organisasi berdampak luas pada penyiapan personel dan sarana prasarana yang seimbang pula. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut, karena beberapa wilayah Korem di provinsi telah dinaikkan menjadi Pati berbintang satu menyesuaikan dengan organisasi Polda.

Pada kesempatan lain Kasdim 1408/BS (Ign) menyatakan bahwa pengembangan pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

“Pemberdayaan yang diperlukan untuk mampu mendukung tugas pokoknya secara optimal, dengan kekuatan personel cukup terbatas (90%) mampu mengamankan wilayah yang memiliki dinamika sangat tinggi, diperlukan penambahan Koramil baru di beberapa daerah sentra industri dan rawan SARA, dan menambah Babinsa dari satu Babinsa untuk satu desa, menjadi dua atau tiga Babinsa untuk tiap desa di Kota Makassar, serta dengan menaikkan kesetaraan organisasi Kodim BS dengan Poltabes dengan Kodim ditingkatkan dipimpin oleh seorang Pamen TNI AD berpangkat Kolonel.”

Pendapat responden di atas yakni dengan menambah Koramil baru sesuai dengan kebutuhan terutama Koramil dekat sentra industry, dekat pelabuhan, dan bandara internasional, ataupun daerah rawan SARA agar dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang ada. Demikian pula perlu penambahan jumlah Babinsa dalam tiap kelurahan yang semula hanya satu menjadi dua untuk keluarahan menjadi solusi yang cukup mendesak.

b. Bidang personel.

Untuk dapat meningkatkan profesionalisme prajurit Kodim, maka menurut Dandim 1408/BS (Mar) pada tanggal 6 Agustus 2013 dinyatakan bahwa:

“Kemampuan personel Kodim yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya disusun dengan komposisi pejabat yang ada di satuan Kodim 1408/BS tersebut. Komandan Kodim (Dandim) harus mampu memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mencapai tugas pokoknya, memelihara dan meningkatkan kelancaran dan perawatan personel, materiil, serta administrasi logistik. Memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kekuatan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan. Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin, serta tata tertib di lingkungan kesatuan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yang perlu diberdayakan adalah memberikan bekal kemampuan Dandim sehingga siap untuk melaksanakan tugasnya, sebagai bekal kemampuan pada tingkat komando kewilayahan.”

Selanjutnya langkah berikutnya Dandim menyarankan upaya sebagai berikut :

“Kepala Staf Kodim (Kasdim) harus mampu mengatur, mengkoordinasikan, dan mengawasi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan staf agar sesuai dengan program kerja. Merumuskan dan menjabarkan dan memberikan petunjuk dan arahan setiap kebijakan pimpinan kepada staf dan kesatuan pelaksana di lapangan. Mengkoordinasikan pembuatan laporan staf dan kesatuan pelaksana sebagai bahan laporan kepada kesatuan atas. Mengusahakan terjalin dan terpeliharanya koordinasi antara eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan, dan eselon pelaksana. Menyusun rencana program dan anggaran Kodim sesuai dengan rencana program dan anggaran Kodam. Menyusun rencana umum tata ruang wilayah (RUTR), serta melaksanakan koordinasi dan memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan agar tidak merugikan kepentingan pertahanan. Menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.”

Berdasarkan pendapat di atas dipandang perlu untuk segera ditempuh langkah strategis terhadap para perwira bawahan di Kodim sampai dengan seluruh staf jajarannya dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Perwira seksi (Intelijen, Operasi, Administrasi, Teritorial) harus mampu melaksanakan fungsi dan menyarankan kepada pimpinan tentang bidang tugas sesuai dengan fungsi masing-masing secara proporsional agar pelaksanaan tugas pokok Kodim dapat berjalan secara optimal.

- 2) Demikian pula Perwira Penghubung, Dan Unit Inteldim, Danramil dan Babinsa mampu melaksanakan pembinaan teritorial dan pembinaan kekuatan untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.

c. Bidang profesionalisme.

Kemampuan personel Kodim yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya juga harus memperhatikan profesionalisme, mampu mengambil keputusan, dan mampu menjadi contoh lingkungannya. Beberapa solusi meningkatkan profesionalisme dikemukakan sendiri oleh Dandim 1408/BS(Mar) dalam wawancara tanggal 6 Agustus 2013 sebagai berikut:

“Oleh karena itu, profesionalisme personel Kodim yang dibutuhkan adalah yang memiliki latar belakang pendidikan/kursus dan pengalaman, dan ditentukan pula oleh luas wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawab Kodim itu sendiri. Komando Pengendalian (Kodal) pada tingkat Kodim yang banyak mengalami kendala terutama dengan banyaknya kegiatan seremonial Kodam dan internal Kodim maupun karena kendala luas wilayah maka dicarikan solusi dengan mengelompokkan Koramil-koramil berdasarkan karakteristiknya, Koramil terpencil, Koramil dekat sentra ekonomi/industri. Koramil rawan SARA dan ancaman lain. Dengan demikian, setiap potensi dan ancaman dapat dipetakan dan diidentifikasi lebih awal oleh Bapul Intel dan Babinsa di lapangan secara dini.”

Berdasarkan pemikiran responden di atas dipandang perlu untuk menempuh langkah-langkah untuk mewujudkannya maka Kodim sebagai komando militer kewilayahan yang menjamin keutuhan wilayah pada tataran Negara demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Yang dilakukan Dandim 1408/BS terhadap organik Kodim dan nonorganik Kodim adalah dengan melaksanakan peran komando teritorialnya, Dandim berupaya meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan tetap dicintai rakyat dengan tidak mengabaikan kewaspadaan terhadap ancaman musuh. Upaya ini dimulai dengan memberikan Santiaji dan Santikarma, sehingga personel Kodim 1408/BS memiliki integritas pribadi yang mantap. Selanjutnya adalah mendidik personel satuan teritorial tersebut sesuai dengan tingkatan dan jabatannya. Mereka yang sudah dididik selanjutnya melatih sesuai unit/satuan dan tanggung jawabnya. Dandim secara terus-menerus selalu meningkatkan upaya ini dengan

pembinaan satuan sesuai tuntutan kebutuhan. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan profesionalisme personel Kodim.

2. Meningkatkan kesadaran bela negara.

Kesadaran bela negara dari masyarakat Makassar dan aparaturnya pemerintah dilakukan melalui pendidikan formal (jalur sekolah), nonformal (lingkungan pekerjaan/pendidikan luar sekolah), dan informal (lingkungan pembinaan/masyarakat).

- a. Menurut Kasdim 1408/BS (Ign) pada pernyataannya tanggal 6 Agustus 2013 antara lain memberikan solusi sebagai berikut:

“Pertama, Kodim 1408/BS melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran bela negara dilakukan kepada seluruh rakyat/masyarakat dan aparaturnya pemerintah secara bertahap dalam rangka membangun daya tangkal bangsa dan negara yang bertumpu pada keterpaduan seluruh komponen kekuatan pertahanan. Esensi bela negara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 antara lain perlunya bela negara. Karena sampai saat ini masih lemah/rendah sehingga perlu dikembangkan dengan sistem dan pola baru disesuaikan dengan kondisi saat ini, yakni melalui pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan informal di keluarga secara optimal.”

“Kedua, mengembangkan komunikasi dengan masyarakat, dialog, dan tatap muka serta anjangsana ke masyarakat sekitar wilayah Kodim/Koramil. Kodim 1408/BS mengimplementasikan konsep sistem pertahanan negara secara lebih aktual untuk masa depan, dapat diterima secara logis bila didukung oleh komponen pendukung seperti halnya rakyat terlatih (Ratih), terutama yang dapat diperankan dalam mendukung logistik wilayah dan dukungan transportasi kepentingan operasional, seperti halnya Perum Migas, Mobil Nasional, rumah sakit di daerah, perusahaan minyak nasional, dan Pertamina misalnya. Dalam keadaan darurat dan mendesak unsur-unsur tersebut dapat diberdayakan menjadi kekuatan pendukung suatu operasi militer maupun non militer”

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap setiap program bela Negara karena masyarakat memang asing dan kurangnya sosialisasi dari Kodim. Daya dukung yang rendah antara lain daiatsi dengan upaya Kodim 1408/BS segera melatih dan menyediakan masyarakat terlatih dan militant melalui pelatihan bela Negara baik untuk OMP maupun OMSP. Diharapkan dengan berfungsinya bela Negara maka di lapisan masyarakat Makassar sehingga tersedia anggota masyarakat militant yang siap setiap saat digerakkan sesuai kepentingan OMP atau OMSP. Tingginya wawasan kebangsaan dan disiplin nasional yang dimiliki kelompok masyarakat terlatih dalam bela Negara menjadi elemen vital dan strategis dalam sistem pertahanan Negara.

- b. Secara khusus Dandim 1408/BS (Mar) menyarankan solusi penanganan bela negara di wilayahnya seperti pada ikhtisar hasil wawancaranya pada tanggal 6 Agustus 2013 sebagai berikut:

“Kasad didukung oleh Panglima Komando Daerah Utama (Kotama) di Kodam-kodam khususnya melalui Kodim 1408/BS Makassar mensosialisasikan ketentuan legal formal tentang pengaturan Sishanneg.”

Upaya yang perlu dikembangkan antara lain adalah pengembangan peranti lunak dan pendukung undang-undang tersebut berupa peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang relevan. Demikian pula koordinasi kelembagaan agar

pembangunan di wilayah/daerah memiliki kesamaan persepsi dan tidak menimbulkan masalah di lapangan. Khusus masalah pertahanan dan keamanan menjadi kewenangan pusat, sehingga otonomi luas tidak diberlakukan ketika berhubungan dengan bidang pertahanan dan keamanan.

3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan teritorial secara proporsional.

Pembangunan kekuatan Sistem Pertahanan Semesta dilakukan secara proporsional dengan membangun komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai langkah dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Pemberdayaan dilakukan dengan menjadikan Kodim 1408/BS sebagai komando teritorial yang dicintai rakyat dengan mensinergikan ketiga komponen kekuatan utama Sishanta. Yang dilakukan Dandim setelah melakukan upaya-upaya internal kepada organik Kodim dan nonorganik Kodim adalah mengupayakan pembinaan teritorial (binter) kepada masyarakat/kelompok di luar Kodim. Seorang Danramil, yakni Danramil-01/Ujung Tanah pada tanggal 13 Juli 2013 (Bur) antara lain memberikan solusi peningkatan pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

“Sebagai komando teritorial, Dandim perlu mengupayakan koordinasi intens Muspida Untuk dapat melaksanakan tugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan

nasional di daerah Kodim harus kompak melalui koordinasi dan kerjasama membangun daerah, mengatasi kesulitan masyarakat, dan menanggulangi bencana alam. Yang dikembangkan adalah bhakti TNI dan binkomsos sesuai kebutuhan masyarakat.”

Berdasarkan saran responden lain yakni Danramil Hus saat wawancara tanggal 13 Juli 2013 menyampaikan solusi tambahan sebagai berikut :

- 1) “Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dandim dan seluruh jajarannya memberikan teladan sebagai aparat keamanan yang memiliki disiplin nasional tinggi, taat asas, taat hukum, dan berupaya memberikan bantuan melalui binkomsos dan bhakti TNI.”
- 2) “Polda.
Dandim dan jajarannya membantu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi bidang tugas Polri. Hal ini tidak bisa terlaksana bila tidak dibina komunikasi dan tidak adanya soliditas. Yang dapat dilakukan Dandim adalah menempuh pembinaan komunikasi sosial (binkomsos) atau mengembangkan KKS TNI secara proporsional serta pembinaan pertahanan wilayah (binhanwil).”
- 3) “Orpol, ormas, dan tokoh masyarakat/agama. Dandim dan seluruh jajarannya menciptakan kerjasama dan saling pengertian terhadap peran masing-masing. Aparat teritorial harus tetap dicintai masyarakat antara lain dengan bersikap netral terhadap kehidupan politik, sebagai fasilitator, dan dinamisator peran mereka setiap terjadi kerusuhan dan konflik sosial di masyarakat. Yang perlu diupayakan adalah pembinaan komunikasi sosial (binkomsos).”
- 4) “Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Dandim dan jajarannya harus bersikap terbuka dan mengembangkan pembinaan komunikasi sosial (binkomsos) sehingga menjadikan LSM sebagai mitra bukan lawan yang selalu mengkritisi Kodim. Perlu dikembangkan ikatan melalui wawasan kebangsaan akan perlunya persatuan dan kesatuan nasional.”

Berdasarkan wawancara di atas perlu ditambahkan unsur masyarakat di dalam upaya tersebut, yakni Dandim dan jajarannya harus mencintai masyarakat, bersikap ramah-tamah, melaksanakan anjingsana untuk memelihara dukungan masyarakat (terutama generasi mudanya) kepada TNI AD khususnya terhadap peran Kodim dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang dikembangkan adalah pembinaan komunikasi sosial (binkomsos) dan keteladanan dalam masyarakat, pembinaan ketahanan wilayah (binhanwil), serta bhakti TNI.

4. Mewujudkan pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan.

Agar negara mempunyai kekuatan pertahanan dan keamanan yang kuat serta mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mendukung pembangunan nasional, maka Dandim 1408/BS secara profesional akan melaksanakan tugas pokoknya seperti dari hasil wawancaranya tanggal 6 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Kodim 1408/BS melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

"Melaksanakan pembangunan bidang pertahanan berdasarkan kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar, pengembangan teknologi pertahanan dalam ketersediaan alutsista, komponen cadangan, dan pendukung pertahanan yang diarahkan pada upaya terus-menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal agar mampu menegakkan

kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI. Implementasi kebijakan MEF adalah dengan meningkatkan profesionalisme aparat teritorial melalui pendidikan/pelatihan. Kursus/penataran, latihan dalam satuan, bukan dengan mengembangkan alat sista.”

Sehubungan dengan saran solusi upaya yang dapat dilakukan responden maka Kasdim 1408 pada wawancara tanggal 6 Agustus 2013 memberikan saran masukan sebagai berikut :

- 1) "Upaya meningkatkan profesionalisme Kodim 1408/BS Makassar dilaksanakan dengan menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan dalam bentuk operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang melalui fokus pengembangan sumber daya manusia."
- 2) "Kepala Staf Angkatan Darat dapat mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan sumber daya manusia aparat teritorial sesuai dengan tuntutan organisasi dan kebutuhan masyarakat."
- 3) " Pangdam menata organisasi Kodim yang profesional dan proporsional Kodim harus tetap solid dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan (***Civic mission***) dalam rangka membantu kesulitan masyarakat dan bantuan kepada Polri bila dibutuhkan. Upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Ikut aktif memberikan masukan kepada pimpinan TNI AD tentang penataan kembali fungsi teritorial sebagai bagian dari fungsi hankam.
 - b) Merevitalisasi dengan validasi organisasi Kodim dalam 3 kelompok besar menjadi tipe Koramil daerah konflik, Koramil daerah rawan/terpencil, dan Koramil di perkotaan/sentra industri. Karakteristik wilayah dan kontijensi yang dihadapi sangat berlainan menjadi alasannya."

Berdasarkan wawancara di atas diperlukan satu langkah lanjutan yang harus segera dilakukan yakni Kodim secara aktif turut serta dalam setiap tugas-tugas *civic mission* yang menjadi tugas pokok TNI di daerah, bersama-sama rakyat mengatasi kesulitan

rakyat, menanggulangi bencana alam, dengan langkah operasional. Demikian pula segera membantu Polri bila dibutuhkan dan berperan dengan penguasa daerah bila terjadi perubahan status dari darurat sipil, darurat militer, sampai dengan dalam keadaan perang. Yang dikembangkan adalah sosialisasi dan legalisasi peranti lunak yang dibutuhkan organisasi. Dengan adanya perubahan struktur organisasi diharapkan dapat dilakukan pelaksanaan tugas pokok secara optimal karena berbasis pada karakteristik komunitas dan tipologi wilayah.

5. Mewujudkan pemberdayaan komando kewilayahan.

Secara terpisah Dandim 1408/BS (Mar) dan Kasdim 1408/BS (Ign) pada tanggal 6 Agustus 2013 menyarankan solusi dalam mewujudkan pemberdayaan komando kewilayahan sebagai berikut:

“Tingkat Kodim, Organisasi Kodim disusun dalam empat eselon dan jabatan yaitu, Kesatu, Eselon Pimpinan, Komandan Komando Distrik Militer, disingkat Dandim. Kedua, Eselon Pembantu Pimpinan, terdiri atas Kasdim, Pasiintel, Pasiops, Pasimin, Pasiter, Pabung. Ketiga, Eselon pelayanan, Keempat, Eselon Pelaksana terdiri dari Danramil dan Danunit Inteldim. Pemberdayaan perlu dilakukan dari setiap unsur eselon dari aspek personel perlu dilengkapi dengan tingkat pendidikan umum pada tingkatan sekolah lanjutan menengah atas. Demikian pula dengan sarana dan prasarana minimal memiliki alat peralatan dan pwersenjataan standar, juga dari tuntutan profesionalisme maka setiap pejabat Kodim dan Koramil harus memahami terhadap jabatan yang diembannya.”

Dandim 1408/BS selanjutnya menyarankan solusi secara lengkap sebagai berikut :

- 1) “ Kodim kota yang membawahi 12 Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Makassar dihadapkan dengan

komposisi personel dan tantangan tugas luas wilayah yang ada maka diperlukan personel yang ahli dalam bidang sistem informasi dan komunikasi untuk mampu mengawasi dan mengendalikan satuan Koramil yang cenderung tersebar di seluruh wilayah Makassar yang jauh dari jangkauan komando kewilayahan.”

- 2) “Di Tingkat Koramil, Susunan personel dan peralatan yang dimiliki Koramil harus dapat dioptimalkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga setiap ancaman dan tantangan yang ada di wilayahnya dapat dihadapi segera.”
- 3) “Pemberdayaan Pangkalan, dilakukan terhadap fasilitas pangkalan berupa bangunan perkantoran, perumahan, gedung pertemuan, ruang rapat, gedung/fasilitas olahraga, medan dan perangkat latihan, serta sarana prasarana Kodim 1408/BS yang tersedia saat ini belum mampu mendukung kegiatan Kodim secara optimal. Dengan demikian, optimalisasi pemberdayaan diprioritaskan pada tempat tinggal/hunian prajurit, alat transportasi dan alat komunikasi bagi personelnnya yang berjauhan sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugas pokoknya di wilayah dalam menjalankan lima kemampuan teritorial.”

Berdasarkan wawancara dua responden yang sangat kompeten di wilayah Kodim maka perlu dikembangkan dengan langkah perlu penanti lunak yang memadai. Peraturan menyangkut pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodim baik berupa buku petunjuk, peraturan-peraturan, perundang-undangan, prosedur tetap, dan referensi lainnya di Kodim seharusnya dapat digunakan dalam melaksanakan tugas di Kodim. Pelaksanaan tugas secara taat asas yang memiliki dasar hukum menjamin rasa aman dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Akan tetapi, ternyata yang terjadi sampai saat ini masih sangat terbatas peranti lunak yang tersedia di Kodim

1408/BS. Sehingga kegiatan belum dapat dioperasionalkan secara optimal dan banyak kerawanan hukum dan rawan salah prosedur. Pemberdayaan peranti lunak dilakukan dengan menyarankan ke komando atas dan mengikuti peranti lunak yang sudah tersedia selama ini.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial dalam rangka mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS telah berjalan sesuai dengan perencanaan baik dengan memperhatikan aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat Makassar, tetapi belum optimal karena keterbatasan peranti lunak yang secara operasional yang dapat dipedomani di lapangan dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap setiap upaya pemberdayaan wilayah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial belum optimal terdiri atas faktor internal berupa keterbatasan dalam pengelolaan organisasi, kemampuan personel, dan sarana prasarana, serta faktor eksternal berupa faktor adanya Kodam sebagai komando atas, kondisi masyarakat Makassar yang spesifik, dan terbatasnya dukungan dari elemen masyarakat di sekitar wilayah Kodim 1408/BS.
3. Strategi yang dikembangkan untuk manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam Sishankamrata di wilayah Kodim 1408/BS adalah dengan meningkatkan profesionalisme personel, meningkatkan kesadaran bela negara, meningkatkan pelaksanaan

pembinaan teritorial secara proporsional, mewujudkan pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan, dan mewujudkan pemberdayaan komando kewilayahan.

7.2 Saran

1. Untuk mengatasi belum optimalnya pelaksanaan manajemen aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS disarankan dilakukan dengan membuat dan memperbaiki peranti lunak berupa Perkasad atau sejenisnya yang secara operasional dapat dipedomani di lapangan siapa berbuat apa dan dengan optimalisasi Kodim menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit di lapangan yang mampu menggugah masyarakat untuk berperan serta.
2. Kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial disarankan diatasi dengan meningkatkan peran Dandim dan perwira staf secara optimal sehingga dapat melaksanakan pengelolaan organisasi, kemampuan personel, dan sarana prasarana, serta memperhatikan faktor eksternal berupa faktor Kodam sebagai komando atas, kondisi masyarakat Makassar yang bersifat spesifik, dan keterbatasan dukungan elemen masyarakat sekitarnya.

3. Strategi yang disarankan untuk manajemen pemberdayaan aparat teritorial pertahanan dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS antara lain dilakukan dengan memberi masukan konstruktif kepada komando atas dan membuat program kegiatan yang relevan dalam meningkatkan profesionalisme personel, meningkatkan kesadaran bela negara, meningkatkan pelaksanaan pembinaan teritorial secara proporsional, mewujudkan pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan, dan mewujudkan pemberdayaan komando kewilayahan.

Temuan penting dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial belum optimal karena keterbatasan pemahaman aparat Kodim 1408/BS sendiri karena minimnya peranti lunak dan rendahnya partisipasi masyarakat, walaupun masyarakat memandang bahwa eksistensi Kodim 1408/BS sangat dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, 2006. *Keterbukaan Informasi dalam Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anak Agung Banyu Perwita, t.t. *Seminar Nasional Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui Pembinaan Teritorial dalam rangka Pertahanan Negara*.
- Armstrong et al, 1995. *Implementation Theory and Practice : Tward a third generation*, Glenview, Illinois, Foresman and Company, New York.
- Analisa Daerah Operasi Kodim 1408/BS Makassar Tahun 2011.
- Budiman, 2003, *Peningkatan Pembinaan Teritorial di Wilayah Korem 121/ABW dihadapkan dengan Tantangan Kewilayahan*, Spersad, Jakarta.
- Budyanto, Rachmat, 2009, *Peningkatan Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Sishankamrata Guna Ketahanan Nasional*, Lemhannas, Jakarta.
- Danpusterad, 2011, *Bahan Seminar Nasional Teritorial: Berbagai Permasalahan Teritorial dalam Pelaksanaannya di Lapangan*.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2004, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta.
- Florence, Davids, 2004. *Optimalize in Concept and Theory*. Published by American Press, New York.
- Frankkurt, Bresnick, 2007. *The Important Organization of Believeness to be Develop*. ELBS and MacDonald and Evans, London.
- Friedlin, G. James, 2004. *Secrets Of Organization Management*, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ginayah, Yasidi, 2006. *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

- Grace, Ackooff, 2008. *A Systems Approach of Organization Development*. Pittsburgh University Press.
- Gregor, Hasmoth, 2007. *Optimalize of Organization: Understanding of Public Service Sector*. Mc Graw Hill, New York.
- Gronov, Donnelly, 2008. *Administration, Organization and Management of Public*, Longman, New York.
- Hari T. Prihartono, 2006, *Penataan Regulasi Keamanan Nasional*, ProPatria Institute, Jakarta.
- Hotmangaraja Panjaitan, 2011, *Bahan Kuliah Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat untuk Kursus Strategi Perang Semesta*.
- Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, 2003, *Permasalahan Hankam di Daerah Perbatasan Sebuah Telaahan Kritis*, Jakarta.
- Koesnanto, Anggoro, 2002, *Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal*, Center for Strategic and Studies, Jakarta.
- Leijent, Sophie, 2006. (Terj.), *Masalah Keamanan Asia*, Centre of Strategic on International Studies (CSIS), Jakarta.
- Madyo, L., 2002. *Kependudukan di Indonesia dan Permasalahannya dalam KSA X Lemhannas*.
- Makalassa, S, 2005. *Memahami Administrasi dalam Teori Optimalisasi Organisasi*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Tiga Putra Utama, Jakarta.
- Naskah Departemen, 2003. *Strategi Penangkalan*, Seskoad.
- Naskah Departemen, 2003. *Hakikat Ancaman*, Seskoad.
- Piliang, Indra J., 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
- Peraturan Kasad No. Perkasad/18/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas Kodim, Ketentuan Dasar, dan Kedudukan*.

Peraturan Kasad No. Perkasad /92/XI/2009 tanggal 30 November 2009 Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat.

Samego, Indria, 2001, *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis Potensi & Problem*, The Habibie Center, Jakarta.

Soemarno Soedarsono, 1997, *Buku Ketahanan Nasional*.

Subroto, Djoko, 1997. *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sudjono, Erwin, 2000. *Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan dalam rangka Menciptakan Stabilitas Keamanan*, Lemhannas, Jakarta.

Surat Keputusan Kasad No Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 Bujuk Induk tentang Pembinaan Teritorial.

Suyner, Craig, 2005, *Maritime Security in Southeast Asia*, Damien Kingsburuy (ed), Monash University Press, Singapore.

Syahnakri, Kiki, 2005. *Memahami Peran Koter dalam Sishankamrata*, Jurnal Yudhagama Edisi Khusus Desember 2005.

Syahnakri, Kiki, 2008. *Pembinaan Teritorial dalam Menghadapi Tantangan Masa Kini*, Dispenad, Jakarta.

Soegiarto, Apriliani, 1995, *Potensi dan Pemanfaatan Sumber Hayati Laut Menjelang Tahun 2000*, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Usman, Wan, dkk., 2003. *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Whittington, Richard, 2001. *Theories of Strategy*, dalam *What is Strategy –and does it matter?*, Thompson, London.

Wibisono, Christianto, 1998. *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Wibisono S., Koento, 1997, *Pancasila dan Era Globalisasi dalam Visi ABRI Menatap Masa Depan*, UGM UP, Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

A. UNTUK PEJABAT DANDIM DAN KASDIM.

1. Bagaimana kondisi manajemen aparat teritorial yang dilaksanakan ?

2. Bagaimana tingkat penerapan secara operasional kegiatan pengorganisasian dalam kaitannya dengan kondisi pemberdayaan wilayah ?

3. Bagaimana kemampuan personel dalam rangka meningkatkan kondisi pemberdayaan wilayah di Kodim 1408/BS Makassar ?

4. Bagaimana kesiapan personel yang bersifat militer dalam menjalankan fungsi pembinaan teritorial kepada seluruh komponen bangsa dan negara ?

5. Permasalahan apa yang sering terjadi di wilayah Kodim 1408/BS ?

6. Bagaimana tingkat partisipasi dalam menjaga dan memelihara keutuhan suatu negara ?

.....
.....

7. Bagaimana penilaian Koramil tentang profesionalisme personel yang ada saat ini ?

.....
.....

8. Bagaimana penilaian Koramil tentang profesionalisme personel berdasarkan komposisi jabatan profesionalisme yang dimiliki oleh Kodim 1408/BS Makassar ?

.....
.....

9. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemberdayaan wilayah dalam rangka Sishamkamrata ?

.....
.....

10. Bagaimana mekanisme operasional pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah ?

.....
.....

B. UNTUK PARA DANRAMIL

1. Bagaimana pandangan Saudara mengenai keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar, apakah dapat melaksanakan tugas pokoknya secara optimal, dan apakah dapat dirasakan mampu membantu masyarakat di wilayah sekitar ?.....

.....
.....

Misalnya membantu dalam aspek apa saja.....

Bagaimana pendapat Saudara tentang bela negara dan partisipasi masyarakat Makassar terhadap upaya Kodim 1408/BS dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan negara ?

.....

Bila dipandang kurang, apakah yang menyebabkan dari partisipasi masyarakat atau pihak Kodim sendiri ?

.....

- 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas profesionalisme personel di Koramil yang anda pimpin ?

.....

..

- 3. Bagaimana pendapat Saudara apakah Koramil yang anda pimpin peduli dengan masalah dan kesulitan-kesulitan masyarakat sekitar ? Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kodim ?

.....

.....

- 4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara pertahanan dan keamanan di wilayah Makassar ?

.....

.....

.....

- 5. Apakah masukan Saudara terhadap keberadaan dan aspek sepak terjang Kodim 1408/BS dan Koramil selama ini di wilayah Makassar ?

.....
.....
.....

- 6. Jelaskan apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan tugas saat ini di Koramil anda ?

.....
.....

- 7. Apa strategi yang anda sarankan untuk mengantisipasi permasalahan di atas yang saat ini terjadi di koramil anda ?

.....
.....
.....

C. UNTUK TOKOH MASYARAKAT/LSM/APARAT PEMDA

- 1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan Kodim 1408/BS di wilayah Makassar, apakah cukup membantu masyarakat di wilayah sekitar ?

.....
.....
...

- 2. Bagaimana pendapat Bapak tentang bela negara dan partisipasi masyarakat Saudara tentang kualitas profesionalisme personel di wilayah teritorial Kodim 1408/BS saat ini ?

.....
.....
.....

Jelaskan alasan Saudara!

3. Bagaimana pendapat Saudara apakah Kodim 1408 peduli dengan masalah-masalah kesulitan masyarakat sekitar? Kegiatan apa yang dilakukan

Kodim.....

.....

.....

4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara pertahanan dan keamanan wilayah Makassar ?

.....

5. Apakah saran masukan Saudara terhadap keberadaan dan sepak terjang Kodim dan Koramil selama ini di wilayah Makassar?

.....

.....